



MEDIA KEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

PERINGKAT NAIK, KREDIBILITAS MEMBAIK

Melengkapi penilaian berbagai lembaga kredit internasional, Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang Indonesia pada kategori layak investasi. Dengan predikat *investment grade*, kredibilitas pemerintah dalam mengelola fiskal semakin diakui.

Momentum untuk menyambut aliran deras investasi ke dalam negeri.



Daftar Isi



Foto Cover
Anas Nur Huda

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufansa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Plh. Kabag Manajemen Publikasi, Rizwan Pribhakti. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyono, Pilar Wiratama, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Dewi Rusmayanti, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman, . **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

8 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA & REPORTASE

LAPORAN UTAMA

- 15 Petik Manfaat naik Peringkat
- 18 Infografis
- 20 Kelayakan Investasi Dongkrak Ekonomi Negeri
- 23 Siap Tampung Aliran Investasi
- 25 Saatnya Investasi Berdatangan

WAWANCARA

- 27 Cinta Bersemi di Perpustakaan

POTRET KANTOR

- 30 Mengawal Produk Regulasi Penganggaran

FIGUR

- 32 Kelola Utang Demi Pembangunan

EKONOMI TERKINI

- 36 Makin Kredibel Mengelola Ekonomi

KOLOM EKONOM

- 40 Pengakuan Terhadap Kredibilitas Fiskal

GENERASI EMAS

- 44 Berniat Terus Meneliti Tikus

OPINI

- 46 Perppu Nomor 1 Tahun 2017: Buka-bukaan Data dan Perlindungan Data

REGULASI

- 48 Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Perpajakan

INSPIRASI

- 50 Saya Ingin Menjadi Presiden

RENUNGAN

- 52 Tidak Perlu Berkecil Hati

BUKU

- 53 Happy Little Soul

JALAN-JALAN

- 54 Pantai Rahasia di Toli-toli

SELEBRITI

- 56 Jalan Sembari Jajan, Kenapa Tidak



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



MULAI
2017

Apa yang perlu dipersiapkan?

PEMDA
Persiapan
Dokumen Tahap 1

1. Perda APBD TA berjalan (berupa hasil rekapitulasi Penerimaan Perda APBD dari DJPK)
2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan



**PENCAIRAN DANA DESA
MELALUI 171 KPPN
DI SELURUH INDONESIA**

KRUSIAL

OM SPAN



Menyusun RPD
Verifikasi
Pengujian SPP



KPPN

Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa disampaikan oleh Pemda ke DJPK, untuk selanjutnya DJPK menyampaikan rekomendasi penyaluran DAK Fisik Triwulan I/sekaligus Tahun 2017 dan Dana Desa Tahap I Tahun 2017 kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA

REKENING KAS UMUM DAERAH

Rekening Desa



Tak Berpuas Diri Dengan Peringkat Layak Investasi

Sebuah capaian luar biasa kembali dicatatkan bangsa ini. Lembaga pemeringkat kredit internasional Standard & Poor (S&P) akhirnya menaikkan *sovereign rating* Indonesia menjadi BBB- dengan *outlook* stabil. Setelah sebelumnya Fitch dan Moody's memberikan peringkat yang sama, maka langkah sudah kini peringkat layak investasi kita raih dari lembaga-lembaga terkemuka. Predikat layak investasi dari S&P sendiri bak penantian panjang yang kini berakhir. Pasalnya, hampir 20 tahun yang lalu, S&P sebetulnya pernah memberikan peringkat *investment grade*. Krisis moneter tahun 1998 menyebabkan peringkat utang kita turun menjadi *selective default*.

Yang lebih menggembirakan, kenaikan peringkat *investment grade* bukan pencapaian satu-satunya. Untuk pertama kalinya sejak 12 tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) 2016. Dengan dua pencapaian ini, tingkat kepercayaan investor terhadap pengelolaan pemerintahan bisa meningkat. Reaksi pasar juga positif, terbukti dengan Indeks Harga Saham Gabungan yang sempat melonjak ke level 5.800, serta menguatnya nilai tukar rupiah. Dalam jangka panjang, diharapkan akan lebih banyak lagi investasi asing yang masuk ke Indonesia karena keyakinan investor akan adanya jaminan dari level *investment grade* tersebut.

Pekerjaan rumah berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kredibilitas pengelolaan pemerintahan, termasuk di bidang fiskal. Di tengah kondisi geopolitik global yang tidak pasti, pemerintah diharapkan dapat menjaga defisit tetap di bawah tiga persen dari produk domestik bruto. Selain itu, peningkatan penerimaan pajak juga menjadi tantangan yang cukup berat.

Penerimaan pajak agaknya masih akan terus mengandalkan basis perpajakan dari hasil *tax amnesty* dan

penguatan kewenangan melalui akses informasi keuangan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Efisiensi dan penghematan belanja untuk mengerem defisit juga mesti digalakkan. Pelaksanaan APBN 2017 akan menjadi ujian pertama untuk penilaian dalam menjaga kredibilitas APBN yang lebih realistis dan transparan.

Hasil pemeringkatan ini sangat menggembirakan, tetapi tidak boleh membuat kita terlena dan cepat berpuas diri. Apalagi peringkat investasi yang diberikan S&P masih di level BBB- atau satu tingkat saja di atas kategori *junk bond*. Tugas pemerintah di bidang perekonomian masih jauh dari selesai. Boleh sejenak dirayakan, tapi bekerja lebih keras seyogyanya menjadi bagian dari upaya mempertahankan pencapaian.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

Agus Gumilar
@agoesgoemilar

Dwi Firlil Ashari
@dwifirli_

tersebut harus diwujudkan dalam pelayanan prima setara internasional. Hal tsb akan membuat org akan tetap sekolah dan berobat di Indonesia. Maka investasi juga bisa membantu banyak orang lain yang membutuhkan.

Bung Stev
@esthevan_

Melihat keseriusan pemerintah di sektor maritim saat ini, saya ingin investasi pemanfaatan hasil2 laut Indonesia.

Investment grade (layak investasi) adalah peringkat utang pemerintah atau perusahaan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat utang. *Investment grade* akan membuat investor lebih yakin dan percaya diri menanamkan modal di Indonesia. Seandainya teman-teman investor, apa bentuk investasi yg ditanamkan di Indonesia?

Investasi di bidang Pariwisata, karena banyak potensi wisata di Indonesia yang belum tersentuh investor.

Jika saya seorang investor di Indonesia, pendidikan & kesehatan akan menjadi dua fokus saya. Byk org sekolah dan berobat ke LN karena menurut mereka kualitas layanan di sana jauh lebih prima. Investasi

Tausiah Usai Salat Berjamaah

Masjid Shalahuddin di kompleks Perkantoran Pajak Kalibata, Jakarta Selatan dipenuhi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ingin mendengarkan tausiah usai salat zuhur berjamaah. Bulan Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Amalan-amalan baik membuahkan pahala yang dilipatgandakan.

Foto
Arief
Kuswanadji



Ada Pelangi di Setiap Hari

Di Semarang, Jawa Tengah, untuk melihat pelangi kini tak perlu menanti hujan reda. Tepatnya di Kampung Wonosari, bianglala bisa disaksikan kapan saja.

Pemerintah kota menyulap pemukiman di kampung itu yang dulu kumuh menjadi indah dengan nuansa beragam warna. Berbeda dengan kampung tematik serupa di Malang dan Jogjakarta, Kampung Pelangi di Semarang memiliki lebih banyak rumah yang dilukis dengan dana APBD Kota Semarang dan dana *corporate social sesponsibility* (CSR).

Foto
Arief
Kuswanadji





07/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Pemerintah Indonesia Tandatangani Perjanjian Pajak Internasional

Pemerintah Indonesia menandatangani *Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI)* pada Rabu (7/6) di Kantor Pusat *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, Paris. MLI merupakan upaya bersama secara global untuk mencegah praktik-praktik yang dilakukan wajib pajak/badan usaha, untuk mengalihkan keuntungan dan menggerus basis pajak suatu negara (*Base Erosion and Profit Shifting*).

Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan. Sebelumnya, komitmen pelaksanaan keikutsertaan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017. Dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017.

Bersama 68 negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi perwakilan Pemerintah Indonesia yang ikut bagian untuk mencegah praktik-praktik penghindaran pajak. Dengan ini, Indonesia dapat mengamankan penerimaan pajak dengan mencegah penghindaran pajak melalui *tax treaty*. Beberapa bentuk penghindaran pajak yang kerap dilakukan badan usaha antara lain memecah fungsi organisasi, memecah waktu kontrak, rekayasa kontrak, serta rekayasa

kepemilikan.

"Kita harus terus menerus berjuang untuk memerangi penghindaran dan pengalihan pajak oleh pembayar pajak Indonesia, termasuk melalui pengumpulan informasi perpajakan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ditempatkan dan disembunyikan di luar Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia ikut dalam kesepakatan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan atau *Automatic Exchange of Information*," jelas Menkeu.

Tanpa kerja sama internasional, para wajib pajak, terutama 1-5 persen orang terkaya dan badan usaha, mudah untuk menghindari dari kewajiban pajak mereka. "Bila Indonesia tidak mampu mengumpulkan pajak, terutama dari kelompok terkaya dan masyarakat yang mampu, maka kita tidak akan mampu membangun sekolah, madrasah, dan pendidikan yang baik, tidak mampu membayar anggaran kesehatan yang cukup, tidak mampu membayar guru, polisi, tentara, hakim. Tidak mampu membantu petani, nelayan, dan usaha kecil, dan Indonesia tidak mampu membangun infrastruktur, air bersih, jalan raya, listrik, pelabuhan, dan lain-lain," tegas Menkeu.

Setelah 68 negara, dalam waktu dekat direncanakan 30 negara lainnya menyusul untuk melakukan penandatanganan perjanjian MLI.



25/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kunjungan Kerja Menkeu ke Palembang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu (24/05). Pada kunjungan kerjanya, Menkeu meninjau beberapa proyek infrastruktur yang sedang berjalan di kota Palembang yaitu *Light Rail Transit (LRT)*, jalan tol Palembang-Indralaya serta *Jakabaring Sport City (JSC)*. "Kita semua tahu bahwa Palembang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dimana lebih dari 12 cabang olahraga akan dipertandingkan disini pada tahun depan dan salah satu persiapan adalah infrastruktur. Infrastruktur tersebut adalah LRT sepanjang lebih dari 24 km yang akan menelan biaya sebesar Rp10,9 triliun yang dipersiapkan dengan sangat baik," kata Menkeu.



25/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Menghadiri Peringatan Hari Jadi ke-60 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara peringatan hari jadi ke-60 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema 'Berbagi, Bersama, dan Membangun' di Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution pada Kamis (25/05). Dalam *keynote speech*nya, Menkeu mengangkat tema Penguatan Ekonomi Syaria'ah dalam Kapasitas Pembangunan Nasional. Menurutnya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF), keuangan syariah memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui dua hal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. "Ini sangat penting dan sesuai dengan kondisi Indonesia. Sistem ini menyumbangkan stabilisasi perekonomian dan keuangan yang lebih baik melalui prinsip bagi hasil dan risiko" ujarnya.

26/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 di Auditorium BPK, Jumat (26/05). Penyerahan LHP ini merupakan lanjutan dari penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Presiden RI beberapa waktu lalu. "BPK menekankan bahwa ada *compliance* atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau prosedur. Jadi ini semua memberikan pesan yang luar biasa penting kepada seluruh Kementerian/Lembaga" jelas Menkeu.





Pekan Pancasila di Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ikut serta dalam acara Pekan Pancasila di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Kamis (01/06), selepas mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila bersama Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran Kabinet Kerja. Menurut Menkeu, dengan mengatakan "Saya Pancasila" merupakan penekanan pada diri sendiri mengenai nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. "Bagi saya, mengatakan Saya Indonesia, Saya Pancasila, sebetulnya memberikan lagi semacam penekanan dan meyakinkan kepada kita bahwa jiwa kita, jiwa Indonesia dan jiwa pancasila. Saya bukan bangsa lain, saya adalah bangsa Indonesia, yang memiliki landasan pancasila. Itu yang ingin saya sampaikan," tegas Menkeu.

01/06
Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI



09/06
Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

Konferensi Pers Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk tenang dalam menghadapi *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, hal ini disampaikan pada konferensi pers yang dilakukan di Aula Cakti Budhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat sore (09/06). "Kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak perlu resah dengan apa yang disebut dengan AEOI ini. Karena yang wajib melaporkan saldo *account* adalah lembaga keuangan. Masyarakat ya tetap saja melakukan (kegiatan perekonomian) seperti biasa, bayar pajak setahun sekali kalau pendapatan diatas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)," ujar Menkeu. Selain hal tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa tidak ada beban pajak tambahan yang dikenakan atas rekening nasabah, data yang digunakan pun hanya untuk melengkapi basis data perpajakan, dan peraturan perundangan menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada DJP.

Agenda

- 1-14/07 Roadshow EuroBond di Eropa
- 4/07 Rapat Kerja Banggar dengan Pemerintah dan BI
- 6/07 Rapat Kerja Banggar dengan Menko-Menko (RKA KL dalam RUU APBNP TA 2017)
- 12-13/07 *International tax conference (ASIA)* di Hotel Mulia
- 13/07 Rapat Kerja Banggar dengan Pemerintah dan BI (Postur Sementara RUU APBNP TA 2017)
- 25/07 Rapat Kerja Banggar dengan Pemerintah dan BI
- 27/07 Rapat Paripurna dengan DPR
- 27/07 *Keynote Adress Invitation* at IFN Indonesia Forum di Hotel Fourseason



12/06

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

Menkeu Menghadiri Peresmian Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meresmikan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, di Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (12/06). PIHPS ini juga menjadi bukti sinergi kebijakan antara pemerintah, BI dan lembaga terkait lain yang tujuannya adalah untuk masyarakat Indonesia. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Perdagangan. Dalam *Keynote Speech*nya, Menkeu menyampaikan bahwa mengukur inflasi secara tepat dapat berpengaruh luar biasa besar bagi pengelola APBN karena sangat dipengaruhi oleh nilai inflasi. Sebagai informasi, PIHPS Nasional menyediakan informasi harga komoditas pangan strategis secara harian di 164 pasar tradisional di 82 kota di Indonesia.

Peluncuran Logo dan website IMF-WB Annual Meetings 2018 dan Voyage to Indonesia (VTI)



13/06
Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Bank Indonesia (Bank Indonesia) Agus D.W Martowardojo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan kegiatan International Monetary Fund (IMF) – World Bank (WB) Annual Meetings 2018. Rakor yang diselenggarakan pada Selasa, (13/06) di aula mezzanine gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Dalam rapat tersebut diluncurkan logo IMF-WB Annual Meetings 2018 dan Voyage to Indonesia (VTI) sekaligus sebagai soft launch website resmi dari event tersebut yang beralamat pada www.AM2018Bali.go.id.

13/06

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI Sepakati Indikator Makro dan Target Pembangunan 2018

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati besaran asumsi ekonomi makro dan target pembangunan dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018. Dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR pada Selasa (13/06), asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati pada kisaran 5,2 - 5,6%. Angka ini meningkat dari nilai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada APBN 2017. Optimisme pada pertumbuhan ekonomi tahun depan, didasari karena Indonesia berhasil memperoleh *investment grade* dari tiga lembaga rating internasional. Selain pertumbuhan, asumsi inflasi ditetapkan pada kisaran 2,5 - 4,5 %, dan nilai tukar Rupiah disepakati berada pada kisaran Rp13.300 - Rp13.500 per dolar AS. "Untuk tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan berada pada kisaran 4,8 persen hingga 5,6 persen, sama seperti yang diajukan oleh pemerintah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.





PETIK MANFAAT NAIK PERINGKAT

Lembaga pemeringkat kredit internasional Standard & Poor's (S&P) memberikan predikat *investment grade* terhadap peringkat utang Indonesia pada bulan Mei lalu.

Indonesia perlu menunggu sekitar enam tahun untuk mendapatkan kenaikan *rating* S&P dari BB+ menjadi BBB- dengan *outlook* stabil. Yang lebih menggembirakan, pada kuartal pertama 2017, sejumlah lembaga lain, seperti Fitch, Moody's, Japan Credit Rating, dan Rating and Investment telah mengafirmasi peringkat utang Indonesia pada kategori layak investasi, sekaligus meningkatkan *outlook* dari stabil menjadi positif.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, peningkatan peringkat utang dipengaruhi oleh hasil kinerja APBN dan belanja produktif, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, peningkatan peringkat utang dipengaruhi oleh hasil kinerja APBN dan belanja produktif. "Kinerja dari APBN atau kebijakan fiskal dianggap mengalami perbaikan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi belanja maupun penerimaan," ujar Menkeu dalam Konferensi Pers tentang Opini

Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 dan Hasil Pemeringkatan S&P di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Jumat (19/5).

Menkeu juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeringkatan oleh S&P, masih terdapat ruang bagi Indonesia untuk memperbaiki tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan *tax ratio*. "Mereka juga melihat bagaimana upaya pemerintah memperbaiki penerimaan perpajakan dengan berbagai macam langkah reformasi. *Pertama*, dengan *tax amnesty*.

Kedua, dengan mengefektifkan potensi perpajakan dan mengambil langkah-langkah sinergis antara Pajak dan Bea Cukai untuk penerimaan negara tanpa menyebabkan perekonomian kita mengalami tekanan," kata Menkeu.

Dalam ketidakpastian perekonomian global, pemberian peringkat layak investasi menjadi bukti kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia. Pada

Peningkatan peringkat utang dari S&P dipengaruhi oleh hasil kinerja APBN dan belanja produktif, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur.

Foto
Anas Nur
Huda

focus group discussion di kantor Badan Kebijakan Fiskal di Jakarta, Jumat (26/5), Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mengungkapkan bahwa *investment grade* menunjukkan utang pemerintah memiliki risiko yang relatif rendah dari peluang *default* atau gagal bayar. “Peringkat kredit Indonesia sebelumnya, yang misalnya berada di level BB, B, atau CCC kerap disebut sebagai obligasi sampah atau *junk bond*,” ujar Telisa. Kenaikan level utang ke titik *investment grade* menjadi penanda bahwa tingkat kepercayaan terhadap suatu negara meningkat. Dari situ, investor berpeluang memindahkan dana dari instrumen investasi jangka pendek seperti saham ke instrumen jangka panjang seperti investasi asing langsung atau yang dikenal sebagai *foreign direct investment*.

Dampak terhadap perekonomian

Dalam wawancara terpisah dengan Media Keuangan belum lama ini, Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness, Eric Sugandhi, mengatakan bahwa peringkat *investment grade* bagi Indonesia yang diperoleh dari semua *rating agencies* terkemuka membuka peluang untuk menarik lebih banyak dana asing ke pasar finansial. “Para investor portofolio global menjadi mempunyai alasan yang lebih kuat untuk menambah alokasi penempatan dana di dalam negeri,” kata Eric. Selain itu, lengkapnya peringkat *investment grade* dari tiga lembaga terkemuka membantu menurunkan biaya penerbitan obligasi baru dan *yield* obligasi pemerintah yang sudah ada.

Eric melanjutkan, dampak yang paling terasa pada jangka pendek adalah kecenderungan stabilitas nilai tukar rupiah dan sedikit penguatan dibandingkan posisi sebelum *rating upgrade*. “Ini bisa membantu pengendalian *imported inflation*,” ujarnya. Di antara sekian banyak persyaratan yang diminta oleh lembaga pemeringkat kredit,

Eric melihat melihat secara garis besar dapat dimasukkan ke dalam dua kategori, yaitu kondisi ekonomi dan politik yang stabil dan kondusif bagi investasi serta pengelolaan APBN yang *prudent*. “Saya berpendapat bahwa pemerintah sudah cukup baik melaksanakan kebijakan di kedua kategori ini,” kata dia lagi.

Pemberian level *investment grade* dari S&P juga berdampak pada obligasi negara. Menurut Loto Srinaita Ginting, Direktur SUN pada Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR), sebagian kelompok investor sebetulnya sudah menganggap Indonesia berada di peringkat *investment grade*, bahkan sebelum S&P mengeluarkan ketetapan. Namun demikian, penilaian S&P akan meyakinkan sekelompok investor lainnya yang ingin berinvestasi dengan syarat Indonesia mendapatkan *rating* layak investasi dari tiga lembaga paling terkemuka (S&P, Fitch, dan Moody’s) atau secara khusus melihat hasil penilaian S&P sebagai acuan.

Loto memberikan contoh obligasi Samurai Bond Indonesia yang ditawarkan kepada investor dari Jepang pada Mei lalu. Pemberian penilaian *investment grade* pada obligasi Indonesia menambah percaya diri para investor tersebut. Samurai Bond tersebut mendapatkan penawaran dua kali lipat dari penerbitan sebelumnya. Menurut data DJPPR, dana yang bisa dihimpun di pasar keuangan dari penjualan Surat Berharga Negara sekitar 5-7,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan pemberian peringkat layak investasi yang memicu penurunan *yield*, terdapat potensi penghematan dana APBN dari penurunan *cost of borrowing* sampai dengan sekitar 1,6 triliun rupiah. Dana ini bisa direalokasikan untuk membiayai belanja yang produktif.

Pengaruh kenaikan peringkat utang Indonesia menjadi *investment grade* juga dipaparkan Ekonom INDEF Bhima Yudhistira. Kepada Media Keuangan awal Juni, Bhima mengatakan bahwa pemberian peringkat layak investasi

akan meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia terutama investasi portofolio. “Hanya dalam waktu tiga hari setelah pengumuman S&P, IHSG sempat melonjak ke level 5.800. Ini bukti bahwa kepercayaan investor meningkat,” kata Bhima. Akibat dari derasnya modal yang masuk, cadangan devisa pun naik hingga 124,95 miliar dolar AS di posisi Mei 2017 atau salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Pertumbuhan realisasi investasi tahun 2017 diprediksi mencapai 14-15 persen (*year on year/yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,4 persen (*yoy*).

Lebih jauh, Bhima menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi akibat kenaikan investasi diprediksi akan berkisar di antara 5,2-5,3 persen pada 2018. Aliran dana asing yang masuk ke Indonesia terutama ke saham tercatat sebesar Rp20,6 triliun (*year to date/ytd*) hingga 9 Juni 2017. “Akibat kenaikan *rating* S&P dan kondisi makroekonomi yang membaik, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih atau *net buy* Rp3,3 triliun (*month to date/mtd*) atau Rp93,7 triliun (*ytd*). Kepemilikan asing di obligasi negara pun meningkat hingga mencapai 39,3 persen dari total porsi,” ujarnya.

Kebijakan lanjutan

Salah satu kelemahan Indonesia menurut laporan S&P adalah posisinya sebagai negara *lower middle income*, *commodity exporter*, serta *capital importer*. Dalam rilisnya, S&P mengingatkan alasan mereka memberikan *outlook* stabil, yaitu jika dalam tiga sampai lima tahun ke depan Indonesia tidak bisa memperbaiki kinerja fiskal, terutama dari sisi penerimaan, *tax ratio*, dan kinerja perdagangan, maka ada risiko penurunan peringkat. Menurut Telisa, pemerintah perlu lebih mendalami lagi pola penilaian lembaga *rating* global dan regional serta menjalin komunikasi lebih intensif dan erat dengan lembaga *rating*. “Penjelasan intensif dan komunikasi yang baik akan



Aliran dana investasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan diprediksi akan lebih banyak mengalir setelah peringkat utang Indonesia berada di level *investment grade* menurut penilaian S&P.

Foto Anas Nur Huda

membantu memperkuat penilaian tentang Indonesia,” kata Telisa.

Yang juga perlu dilakukan adalah memperkuat *credit rating* di tingkat regional dan domestik. Menurut Telisa, pemerintah juga perlu memanfaatkan momentum kenaikan level utang dari S&P, tetapi tetap hati-hati dalam pemanfaatan aliran dana yang masuk untuk meningkatkan produktivitas.

Sementara itu, Eric berpandangan bahwa pemerintah harus tetap memprioritaskan kebijakan pada penciptaan kondisi politik dan ekonomi yang stabil dan kondusif untuk investasi serta mengelola APBN secara *prudent*. Yang kedua, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia selama ini telah dan sedang mendorong pendalaman dan perluasan pasar keuangan, di antaranya dengan mendorong berbagai instrumen investasi di pasar finansial. Eric menilai bahwa hal ini sangat baik dan harus terus

dilanjutkan, sehingga dana-dana asing yang masuk memiliki lebih banyak pilihan instrumen untuk penempatan. “Obligasi korporasi harus lebih didorong, karena selama ini sebagian besar investor portofolio di pasar obligasi masih terlalu condong menempatkan dana mereka di obligasi pemerintah,” kata Eric memberikan catatan.

Lebih jauh, Eric juga berpandangan pemerintah pusat harus memberikan disinsentif, misalnya pemotongan dana alokasi, kepada pemerintah daerah yang tidak menggunakan dana alokasi dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di daerah dan malah menempatkan terlalu banyak bagian dari dana ini di bank-bank pembangunan daerah (BPD). “BPD-BPD ini malah yang menggunakan dana alokasi dari pusat untuk membeli obligasi pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk menyambut potensi aliran investasi di sektor riil dan sektor keuangan setelah

pemberian level *investment grade*, Bhima menyarankan pemerintah juga memperhatikan perlunya peningkatan peringkat daya saing. Dalam Global Competitiveness Index versi Bank Dunia pada 2016, peringkat Indonesia merosot dari posisi 39 ke 41. “Bukan berarti pemerintah tidak melakukan kebijakan terobosan, misalnya melalui paket kebijakan ekonomi, tetapi ada kecenderungan negara lain seperti India melakukan percepatan perbaikan daya saing,” kata Bhima. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh terlena dan harus kerja lebih keras untuk memperbaiki daya saing terutama berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, efisiensi birokrasi, dan kemudahan perizinan.

Kunci mempertahankan *investment grade* dari tiga lembaga *rating* papan atas, Bhima menambahkan, adalah kredibilitas fiskal dan stabilitas politik yang terjaga. Tantangan terbesar fiskal saat ini salah satunya mempertahankan defisit agar terjaga dibawah tiga persen terhadap PDB. Oleh karena itu, penerimaan perpajakan harus terus ditingkatkan dengan berbagai cara, baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.

Selain itu, industri dan ekspor harus terus didorong agar fundamental ekonomi makin kokoh. Selanjutnya adalah menjaga iklim investasi dan stabilitas politik. “Menjelang pemilu 2019, pemerintah dan masyarakat harus menjaga agar tidak terjadi kegaduhan, sehingga investor makin percaya terhadap Indonesia,” ujar Bhima.

Teks Dwinanda Ardhi

INDONESIA LAYAK UNTUK INVESTASI

Kenaikan rating yang diberikan Standard and Poors (S&P) pada 19 Mei 2017 melengkapi peningkatan rating yang telah diberikan Moody's dan Fitch kepada Indonesia. Peningkatan rating dari ketiga lembaga independen internasional tersebut telah menaikkan status Indonesia ke posisi investment grade. Posisi ini tentu akan meningkatkan kepercayaan investor bahwa Indonesia dinilai sebagai negara yang layak untuk menanamkan investasinya.

Investment grade merupakan peringkat yang diberikan kepada debitur yang ditentukan dari hasil penilaian terhadap nilai obligasi atau surat utang yang diterbitkan sebuah korporasi ataupun pemerintah.

Alasan diberikan Penilaian ini diberikan lembaga independen untuk mengukur kemampuan debitur. Dengan tercapainya peringkat investment grade, korporasi maupun pemerintah sebagai penerbit obligasi dinilai sudah layak untuk memenuhi pembayaran kewajiban hutang-hutangnya.

Ada beberapa tingkatan. Tingkatan di dalam penilaian peringkat investasi mengindikasikan semakin tinggi peringkat kredit, maka semakin rendah tingkat premi risiko yang diminta investor, sehingga biaya utang yang harus ditanggung debitur akan semakin menurun.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG S&P MENAIKKAN RATING



Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai cukup tinggi meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.



Rasio utang yang masih rendah



Likuiditas eksternal yang kuat.



Penerapan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter yang **disiplin dan berhati-hati**.

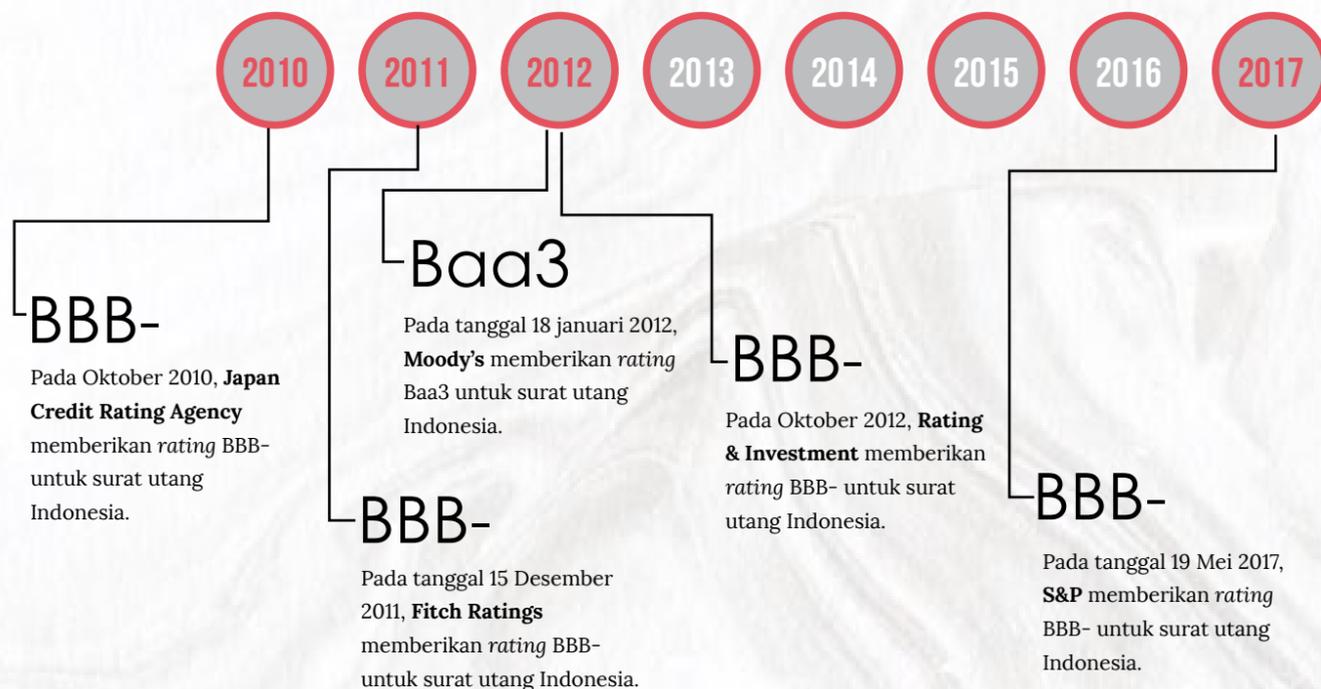
PERINGKAT DARI TIGA LEMBAGA RATING

Tahun	Nilai Peringkat		
	Moody's (Positive)	S&P (Stable)	Fitch (Positive)
2007	Ba3	BB-	BB-
2008	Ba3	BB-	BB
2009	Ba3 (kemudian Ba2)	BB-	BB
2010	Ba2	BB	BB+
2011	Ba1	BB+	BB+ (kemudian BBB-)
2012	Baa3	BB+	BBB-
2013	Baa3	BB+	BBB-
2014	Baa3	BB+	BBB-
2015	Baa3	BB+	BBB-
2016	Baa3	BB+	BBB-
2017	Baa3	BBB-	BBB-

MANFAAT PENINGKATAN PERINGKAT INVESTMENT GRADE

- » Meningkatkan aksesibilitas kepada sumber-sumber pendanaan internasional dengan biaya (*cost of fund*) yang lebih murah.
- » Meningkatkan *capital inflow* ke Indonesia.
- » Memperluas basis investor dan peningkatan investasi jangka panjang.
- » Mendorong perbaikan indikator pasar keuangan Indonesia.
- » Mendorong peningkatan dan perbaikan batas atas atau *ceiling* dari *credit rating* sektor swasta di Indonesia sehingga meningkatkan penjualan emisi obligasi milik swasta serta menurunkan biaya utang pemerintah.
- » Mencerminkan penurunan *Sovereign Risk* di Indonesia.
- » Meningkatkan pertumbuhan ekonomi akibat meningkatnya investasi dan perdagangan.

» Sumber: DJPPR, Moody's, Fitch Rating, dan S&P, dan Bank Indonesia (Siallagan & Lulu, 2011), Siaran Pers Kementerian Keuangan.



KELAYAKAN INVESTASI DONGKRAK EKONOMI NEGERI

Country	Moody's	S&P	Fitch	R&I
Taiwan	Aa3	AA-u	AA-	AA
Japan	A1	A+u	A-	AA
Malaysia	A3	A-	A-	AA+
Thailand	Baa1	BBB+	BBB+	A
Philippines	Baa2	BBB	BBB-	BBB+
India	Baa3	BBB-u	BBB-	BBB
Kazakhstan	(P)Baa3	BBB-	BBB	BBB
Indonesia	Baa3	BBB-	BBB-	BBB-
Vietnam	B1	BB-	BB-	BB-
Bangladesh	Ba3	BB-	BB-	NR
Sri Lanka	B1	B+	B+	NR
Cook Islands	NR	B+	NR	NR
Fiji	B1	R+	NR	NR

Rating: Up, Down, No Change, Initial, Affirmation (R&I Only)

Rating News | NEWS »

- 1) Qatar Ratings May Be Cut by Fitch
- 2) South Africa Escapes Junk at Moody's as Rating Cut One Step (2)
- 3) Moody's Downgrades South Africa's Rtg to Baa3, Outlook Negative

Kini satu lagi lembaga independen internasional melengkapi peringkat layak investasi di Indonesia. Standard and Poor's (S&P) menaikkan peringkat layak investasinya kepada Indonesia pada 19 Mei 2017 lalu dengan peringkat BBB- dan *outlook stable*. Sebelumnya beberapa lembaga pemeringkat dunia lainnya secara berturut-turut menaikkan level investasinya untuk Indonesia yang dimulai dari Japan Credit Rating Agency (JCRA) pada Juli 2010, Fitch Rating pada Desember 2011, Moody's Investor Service pada Januari

2012, dan Rating and Investment pada Oktober 2012.

Peringkat kredit tersebut merupakan opini dari lembaga pemeringkat independen terkait risiko kredit berdasarkan hasil penilaian terhadap kemampuan pembayaran suatu entitas (pemerintah/korporasi) untuk memenuhi kewajiban utanganya. Peringkat ini merupakan salah satu

acuan bagi para investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Selain itu, peringkat ini juga sering dijadikan tolok ukur perbandingan kinerja ekonomi antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Persepsi internasional

Peringkat *investment grade* pada suatu negara menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam

hal pemenuhan kewajiban dari suatu negara sehingga negara tersebut memiliki tingkat risiko kredit dan memiliki prospek investasi yang semakin baik. Sebaliknya, peringkat di bawah *investment grade* menunjukkan risiko gagal bayar yang lebih tinggi dan prospek investasi yang lebih rendah. Lembaga pemeringkat juga mengeluarkan penilaian dalam bentuk *outlook*. *Outlook positive* mengindikasikan negara tersebut memiliki peluang untuk naik level pada periode selanjutnya, *outlook stable* berarti diasumsikan ekonominya tidak akan terlalu banyak mengalami perubahan, serta *outlook negative* yang menunjukkan peluang untuk turun dari level sebelumnya. Dengan begitu, kenaikan peringkat layak investasi Indonesia menunjukkan bahwa dunia memiliki persepsi yang positif terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.

Di sisi lain, Chief Economist Mandiri, Anton Hermanto Gunawan, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memang membutuhkan pembiayaan yang besar untuk melaksanakan pembangunan, sementara sumber pendanaan domestik dinilai masih terbatas. Untuk itu, investasi dan dana dari luar negeri menjadi salah satu sumber pembiayaan. Momen ini menjadi tepat saat dunia mengakui Indonesia sebagai salah satu tempat yang layak untuk mengembangkan investasi. Dengan *rating investment grade*, risiko gagal bayar dari negara tersebut dinilai menurun, sehingga tingkat imbal hasil pun akan turun dan pembiayaan dari negara lain. Biaya yang lebih murah itu tentunya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, BUMN, maupun

swasta untuk melaksanakan pembiayaannya, sehingga diharapkan program-program kebijakan dan ekonomi pun bergulir dengan lebih cepat.

Pengelolaan utang yang prudent

Salah satu indikator yang digunakan S&P untuk memberikan peringkat layak investasi adalah adanya penilaian fiskal terhadap pengelolaan beban utang (*debt burden*). Direktur Surat Utang Negara (SUN), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Loto Srinaita Ginting, menjelaskan bahwa hal tersebut didukung dengan strategi pembiayaan negara yang memang dilakukan secara *prudent*, dan *comply* dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, dengan cara menjaga pengelolaan defisit APBN agar tidak melebihi batas 3 persen serta menjaga *debt ratio* maksimal 60 persen. Menurutnya, hal tersebut juga yang membedakan pengelolaan utang di Indonesia dengan negara lainnya. Tercatat posisi rasio utang terhadap PDB Indonesia saat ini masih berada di bawah 30 persen. Sementara itu, menurut Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Scenaider Siahaan menjelaskan bahwa peningkatan *credit rating* lebih berpengaruh pada penurunan *yield* yang selanjutnya akan menurunkan biaya utang. Menurutnya, biaya utang menjadi salah satu bagian anggaran yang menyumbang pada defisit APBN dan saat ini defisit APBN dibiayai sebagian besar dari pembiayaan utang. Untuk itu, ia berharap agar kebutuhan utang baru ke depannya dapat semakin menurun, atau dengan kata lain *debt outstanding*-nya semakin

kecil. Hal ini dapat tercapai dengan adanya penurunan dari *yield* akibat tingkat premi risiko yang turun. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hal tersebut berdampak pula terhadap penurunan *cost of fund* atas penerbitan utang baru.

Menambahkan hal di atas, Anton, Chief Economist dari Mandiri, menganggap bahwa penilaian *sovereign debt burden* oleh S&P yang dianggap *strong* menunjukkan bahwa S&P mengakui *debt burden management* di Indonesia telah dilaksanakan dengan baik, terutama bila dikaitkan dengan tata kelola dan batasan dalam kebijakan belanja pemerintah. "Jadi mungkin cara untuk mengelola *market*-nya, pengembangannya segala macam dan kemudian komitmen untuk selalu membayar kita, praktis tidak pernah *default*", ungkapnya.

Dampak layak investasi

Lebih lanjut, Anton menjelaskan bahwa secara umum apabila suatu negara masuk ke dalam kelompok *investment grade* akan secara langsung menaikkan *sovereign rating*-nya. Apabila *sovereign rating*-nya dinaikkan, berarti peluang korporasi, terutama BUMN, untuk menaikkan ratingnya pun akan semakin besar karena *relative premium risk*-nya terhadap negara juga ikut menurun. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa korporasi swasta dan BUMN dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih murah lagi dari luar negeri. Hasilnya, tentu saja akan menurunkan total biaya dan meningkatkan efisiensinya. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa jika dilihat secara perekonomian agregat, manfaat dari kenaikan level investasi tersebut bukan hanya dari sisi yang pinjam-

19 Mei 2017 lalu, Standard and Poor's (S&P) menaikkan peringkat layak investasinya kepada Indonesia pada level BBB- outlook stable, melengkapi empat lembaga pemeringkat: Fitch, Moody's, R&I, dan JCRA yang sebelumnya telah naik terlebih dahulu.

Foto
Andi Abdurrochim

meminjam saja, namun juga dapat membuka peluang masuknya modal asing melalui pasar keuangan ataupun secara langsung melalui *Foreign Direct Investment* (FDI). Dari segi fiskal, Anton berharap kenaikan peringkat tersebut akan dapat menekan biaya peminjaman dan mengurangi beban belanja bunga utang.

Sementara itu, Direktur SUN, Loto menjelaskan bahwa kenaikan tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap APBN. Ia mengakui bahwa terdapat sekelompok investor yang baru dapat melakukan investasi apabila sudah mendapatkan rating dari tiga lembaga rating dunia. Ia mencontohkan dalam penawaran *Samurai Bond* akhir-akhir ini, terdapat kenaikan permintaan sebanyak dua kali lipat dari investor di luar perkiraan awal dibandingkan dengan tahun lalu. Meski Jepang termasuk salah satu investor yang konservatif, dengan adanya peringkat baru S&P ini memberikan *confident* yang cukup besar bagi mereka untuk berinvestasi di *global bonds*.

Hal tersebut terlihat jelas dalam tren *yield* dari *Samurai Bond* tahun ini dibandingkan dengan tahun 2016. Menurut Loto, pada tahun 2016 untuk bond dengan tenor 3 tahun memiliki *yield* di level 0,83 persen, sedangkan pada tahun ini, untuk *Samurai Bond* dengan tenor yang sama memiliki *yield* sebesar 0,65 persen, atau dengan kata lain terdapat penurunan sekitar 18 basis poin. Untuk *Samurai Bond* yang memiliki tenor 5 tahun juga mengalami penurunan dari *yield* tahun lalu sebesar 1,16 persen, menjadi 0,89 persen pada tahun ini atau terjadi penurunan 27 basis poin. Tren positif tersebut dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan diversifikasi instrumen dengan penerbitan *Samurai bonds* untuk tenor yang lebih panjang dan tingkat bunga yang lebih kompetitif. Sementara itu, tren positif tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperluas pangsa pasar dari *global bonds*.

Menjaga momentum

Sementara itu, untuk menjaga momentum yang baik ini, Chief Economist Mandiri, Anton Hermanto Gunawan, menjelaskan bahwa dibandingkan dengan empat lembaga rating sebelumnya, S&P masih memberikan peringkat BBB dengan *outlook stable*, sementara yang lain sudah memberikan peringkat BBB dengan *outlook positif*. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk meningkat di tahun depan. Di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah

risiko-risiko yang berpotensi untuk menurunkan peringkat. Untuk itu, ia berharap pemerintah harus bisa mengelola tekanan-tekanan yang berpengaruh terhadap *macroeconomics stability* yang mana dapat mempengaruhi kemampuan untuk membayar ke depan. Ia menilai bahwa kondisi makroekonomi sampai saat ini masih terlihat cukup kredibel.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan peran politik terhadap kondisi makroekonomi. Tak hanya itu, terkait masalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga membutuhkan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut terutama terkait dengan *industrial policy* yang perlu diarahkan untuk menyokong proyek konektivitas yang sedang dibangun oleh pemerintah. Kebijakan itu menjadi penting karena diharapkan konektivitas yang dibangun tidak hanya menciptakan urbanisasi ke pusat kota, tetapi lebih ke arah menciptakan berbagai *urban center* baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan potensi ketidakpastian yang berasal dari kondisi global, seperti kondisi ekonomi China dan kebijakan Presiden Trump di Amerika.

Dari segi risiko APBN, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso, menilai bahwa peningkatan aliran investasi ke dalam negeri sebagai dampak kenaikan peringkat tersebut akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat

meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.

Dari sisi belanja negara, Brahmantio menjelaskan bahwa adanya keterbatasan *fiscal space* untuk membiayai pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan dari investasi luar negeri. Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan melalui skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sehingga pendanaan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada APBN. Terkait dengan pembiayaan infrastruktur, menurutnya, saat ini terdapat beberapa BUMN yang menerima penugasan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur. Risiko yang timbul dari penugasan tersebut adalah kemampuan keuangan BUMN untuk pembiayaan investasi proyek infrastruktur tersebut. Dengan adanya kenaikan rating investasi, BUMN yang memperoleh penjaminan dari pemerintah dapat ikut meningkat ratingnya dan pada akhirnya dari BUMN tersebut dapat mendapatkan akses pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah.

Namun demikian, pemerintah tidak boleh terlena dengan keberhasilan ini. Kenaikan peringkat kredit ini merupakan tantangan bagi pemerintah agar tetap mampu secara terus menerus meningkatkan pengelolaan ekonomi, sosial, politik dan keamanan ke arah yang lebih baik sehingga diharapkan kenaikan peringkat kredit tersebut dapat terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Teks Abdul Aziz



SIAP TAMPUNG ALIRAN INVESTASI

Aktivitas di Bursa Efek Indonesia

Foto Anas Nur Huda

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 kinerja perekonomian Indonesia sudah jauh membaik. Dengan prinsip kehati-hatian dalam manajemen keuangan negara, risiko sektor keuangan maupun utang pemerintah menjadi lebih rendah. Hal ini dipastikan oleh diperolehnya peringkat *investment grade* oleh dua lembaga yakni Fitch pada Desember 2011 dan Moody's pada Januari 2012.

Menurut Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, peringkat layak investasi dari Standard & Poor's (S&P) melengkapi pengakuan dari semua lembaga *rating* akan arah pengelolaan ekonomi Indonesia yang sudah tepat. "Dengan status tadi *moga-moga* memberikan keyakinan para pelaku ekonomi untuk mau menanamkan modal di Indonesia," katanya.

Hidayat Amir, peneliti Badan Kebijakan Fiskal mengatakan sebelumnya ada keraguan terhadap potensi *shortfall* di APBN sebab Indonesia tengah gencar membangun infrastruktur sementara pemungutan pajak masih terkendala. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan risiko utang pemerintah. Ini salah satu variabel yang menjadi pertimbangan S&P. "Kebijakan yang lebih hati-hati dalam pengelolaan APBN kembali meningkatkan kredibilitas fiskal. Jadi pengakuan dari S&P ini melegakan semua pihak, terutama investor dan pemerintah," ujar Amir.

Dijelaskan Suahasil lebih lanjut, *rating* bukan segalanya. Ada banyak hal yang turut bermain bersama dan mempengaruhi pertumbuhan dan investasi, misalnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan sektor riil, kebijakan mengenai dunia usaha, kemudahan berusaha, hingga hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain. "Menurut saya kita harus melihat konteks ekonomi itu dinamis. Pembuat kebijakan harus bisa membaca seluruh faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi. Semuanya mempengaruhi pertumbuhan, inflasi, dan asumsi-asumsi ekonomi makro," jelasnya.

Senada dengan Suahasil, Amir mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi favorit di Asia. Penilaian yang dilakukan oleh S&P menunjukkan bahwa risiko atau

ketidakpastian menurun menuju level yang aman. Namun, masih banyak hambatan investasi ke Indonesia yang harus disingkirkan.

Hasil survei Bank Dunia yang dirilis Maret lalu menunjukkan bahwa kemudahan investasi di Indonesia masih berada di peringkat 91, meski sudah meningkat 15 peringkat dari peringkat 106 di tahun 2016. Namun, ini masih jauh dari target reformasi pemerintah untuk masuk ke 40 besar. "Jadi, kita perlu terus meningkatkan kualitas birokrasi agar masuknya investasi makin deras. Selain itu, stabilitas politik dan ekonomi, termasuk sektor keuangan juga perlu terus dijaga," katanya.

Amir menuturkan sebetulnya kelengkapan peringkat layak investasi ini merupakan momentum yang pas dan telah ditunggu-tunggu, terutama karena pemerintah sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur. Apalagi secara alami proyek infrastruktur memiliki dua karakter yakni membutuhkan dana besar dan bersifat jangka panjang. Sementara di sisi lain, kebanyakan sumber pembiayaan domestik berasal dari sektor perbankan yang bersifat jangka pendek. Kondisi *mismatch* pembiayaan ini yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur sekian lama.

Meski sulit untuk mengestimasi besaran investasi yang akan masuk, namun persepsi risiko investasi yang makin baik akan membantu menarik dana dari asing masuk ke Indonesia,

baik melalui instrumen investasi langsung ataupun melalui pasar uang dan pasar modal. Dengan begitu, imbal hasil surat utang pemerintah dan swasta juga akan menurun.

Menurut Amir, proses pembiayaan melalui instrumen kreatif perlu terus dikembangkan. "Saya dengar beberapa perusahaan sedang menyiapkan efek beragun aset. Saya pikir gagasan ini sangat baik. Selain itu, sektor manufaktur juga akan semakin bergairah. Dengan *cost of fund* yang lebih murah maka akan mengurangi beban investasi. Peluang untuk tumbuh dan ekspansi bisnis akan semakin terbuka.

Ditanya mengenai negara yang paling berpotensi berinvestasi ke Indonesia, Suahasil mengatakan bahwa basis modal bukan hanya soal negara tetapi langsung ke investornya. "Tentu penting bagi kita untuk bicara dengan negaranya. Tetapi ujung-ujungnya yang perlu kita yakinkan adalah investornya agar mau membuka pabrik atau menjalankan perusahaannya di Indonesia. Dengan begitu, dia akan bawa uang, buka usaha di sini, merekrut tenaga kerja, memproduksi barang dan jasa, lalu membayar pajak," ujarnya. Amir menambahkan saat ini negara asal investor di Indonesia tidak berubah. "Singapura, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat masih menjadi *top investor* bagi Indonesia," ujarnya.

Teks Irma Kesuma



Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara

Foto Resha Pratama

SAATNYA INVESTOR BERDATANGAN

Predikat *investment grade* membawa angin segar bagi dunia investasi Indonesia. Daya tarik Indonesia diharapkan menjadi magnet para investor demi pertumbuhan ekonomi.

Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) telah memberikan Indonesia predikat *Investment grade*. Apa makna pemberian peringkat tersebut bagi Indonesia secara umum?

Indonesia sudah mendapatkan status *investment grade* dari Fitch Ratings dan Moody's Investors Service (keduanya adalah lembaga pemeringkat utang internasional) sejak beberapa tahun lalu. Malah kalau mau ditambah lagi, kita juga sudah mendapatkan *Investment Grade* dari Japan Credit Rating Agency (JCRA) dan Rating and Investment Information (R&I). Keempat lembaga pemeringkat itu sudah memberikan *positive outlook*.

Nah kini S&P telah melengkapi predikat *investment grade* yang dimiliki Indonesia. Artinya, predikat tersebut merupakan bentuk pengakuan bawa perekonomian Indonesia berada di *track* yang benar. Selain itu, predikat *investment grade* juga berimplikasi pada cara pandang orang lain di luar lembaga pemeringkat terhadap perekonomian Indonesia. Dengan komplitnya status *investment grade* yang diperoleh Indonesia, maka pelaku ekonomi harusnya lebih yakin bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang baik.

Apa bentuk investasi yang diharapkan pemerintah?

Dengan level *investment grade* yang diperoleh Indonesia, diharapkan para investor semakin yakin dan percaya diri dalam menanamkan modal di Indonesia. Bentuknya bisa dalam penanaman modal langsung (*Foreign Direct Investment*), seperti membuka pabrik dan memproduksi barang dan jasa di Indonesia. Upaya pemerintah menarik investor ini tak semata-mata dikarenakan adanya *investment grade*, tapi juga terkait hal lain, seperti kepastian hukum, infrastruktur, *business permit*, *business license*, listrik, telekomunikasi, dan sebagainya.

Jenis penanaman modal lainnya yaitu penanaman modal melalui pasar modal (*portfolio investment*) dengan membeli surat utang negara. Oleh karena itu, para investor sangat memperhatikan predikat yang diberikan lembaga pemeringkat utang. Dengan komplitnya predikat *investment grade* yang diperoleh Indonesia,

diharapkan surat utang kita akan semakin banyak dibeli investor. Terkadang ada tipe investor yang mau berinvestasi pada suatu negara jika telah memiliki predikat *investment grade* yang komplit. Setelah predikat *investment grade* dari S&P ini, akses Indonesia terhadap investor akan semakin luas.

Kriteria apa yang menjadikan Indonesia mampu meraih predikat *investment grade*?

Lembaga pemeringkat itu melihat perekonomian Indonesia secara keseluruhan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN harus dikelola dengan benar dan mengutamakan efisiensi. Kemudian juga ada sektor belanja. Belanja yang produktif itu seperti apa? Yaitu belanja yang bisa menimbulkan *multiplier effect* bagi produk nasional, seperti belanja infrastruktur. Infrastruktur akan mampu meningkatkan kapasitas perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Nah APBN juga memiliki pembiayaan melalui utang. Utang bisa dikelola dengan baik, jangan sampai terlalu besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Jadi lembaga pemeringkat itu melihat cara kita mengelola semuanya. Mengelola pajak, penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Poin tersebut merupakan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter juga harus diperbaiki terus. Bagaimana kebijakan moneter bisa menjaga inflasi, bagaimana agar nilai tukar Rupiah jangan terlalu

volatile (terlalu cepat naik dan turun). Selain itu perlu diperhatikan juga kebijakan sektor riil kita yang meliputi sektor pertanian dan sektor industri. Jika semuanya kita kelola dengan baik, baik kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sektor riil, maka *investment grade* akan bisa kita pertahankan dan tingkatkan.

Menurut Anda, bagaimana *investment grade* bisa mendorong pertumbuhan ekonomi?

Investment grade ini hanyalah sebuah perspektif atau cara pandang. Untuk melihat angka pertumbuhan, kita harus melihat perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi itu ada sumber-sumbernya, antara lain dari konsumsi, investasi, ekspor impor, dan peranan pemerintah. Kemudian faktor-faktor tersebut bekerja, termasuk di dalamnya *investment grade*, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan sektor riil, kebijakan mengenai dunia usaha, *ease of doing business* (kemudahan berbisnis), hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain, dan sebagainya. Semua hal itu ikut berperan. Berikutnya, implikasi *investment grade* bersama-sama faktor ekonomi dan non-ekonomi akan membentuk pertumbuhan, inflasi, dan asumsi-asumsi ekonomi makro.

Apa harapan Anda dalam mempertahankan dan meningkatkan level *investment grade*?

Tentunya kita ingin meningkatkan *investment grade* hingga level tertinggi. Peringkat itu akan naik kalau kita mengelola perekonomian lebih baik lagi. Tapi naik peringkat itu bukan satu-satunya tujuan. Tujuan utama pengelolaan perekonomian yang baik adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kita ingin PDB per kapita naik dan terus membesar. Kita juga ingin kemampuan konsumsi dan kemampuan memproduksi barang jasa semakin baik. Kita ingin memastikan APBN dikelola secara efisien.

Itu semua adalah bentuk keinginan menuju bentuk ideal dari pengelolaan negara yang sampai sekarang terus kita upayakan. Perbaiki yang kita lakukan untuk negara ini bukan semata demi peringkat, tapi kita ingin masyarakat lebih sejahtera, adil, dan makmur.

Teks Pradany Hayyu



Minat Baca Bersemi di Perpustakaan

Buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Pepatah ini akrab di telinga kita. Melalui koleksi bacaannya, perpustakaan menawarkan gerbang cakrawala menuju ilmu pengetahuan yang luas. Ditemui di kediamannya di bilangan Rawamangun Jakarta, Sulisty Basuki, profesor ilmu perpustakaan pertama di Indonesia membagikan pandangannya mengenai keistimewaan perpustakaan.

Foto
Dok. Biro KLI



Sulisty Basuki, profesor ilmu perpustakaan pertama di Indonesia

Foto Arfindo Briyan Santoso

cara dicetak atau diubah dalam bentuk digital harus meminta ijin dan membayar royalti sehingga tidak melanggar hak cipta. Dalam hal ini di Indonesia masih banyak salah kaprah. Sementara untuk *e-journal* biasanya bentuknya adalah berlangganan. Jadi bisa diakses dari mana saja.

Apa tugas seorang pustakawan yang tidak banyak diketahui orang?

Secara filosofis pustakawan merupakan perantara antara unit informasi dengan unit pemakai. Sebagian orang beranggapan dengan mesin pencari seperti Google orang bisa langsung tahu semuanya. Padahal hasil mesin pencari berisi banyak 'sampah'. Diperlukan tenaga pustakawan untuk membantu mencari, mengarahkan, dan memilah informasi yang sesuai kebutuhan. Selama ini masyarakat awam menganggap tugas pustakawan hanya mengatur buku. Padahal lebih dari itu pustakawan juga melayani penelusuran sumber-sumber referensi dan literatur. Di Indonesia seringkali petugas perpustakaan semata menunggu buku tamu atau membantu *photo copy*.

Ada kode etik yang mengharuskan pustakawan untuk mampu menjawab semua pertanyaan pengguna perpustakaan. Misalnya kalau lagi menyusun skripsi coba tanya ke pustakawan kampus literturnya apa saja. Sumber primer dan sekundernya apa. Meski butuh waktu, harusnya pustakawan bisa menjawab. Namun hal ini *gak* dilakukan mahasiswa karena kebanyakan mereka *gak* tahu. Di perpustakaan umum juga begitu, sama saja.

Seperti apa perpustakaan umum yang ideal untuk semua kalangan?

Pertama, perpustakaan umum harus terbuka untuk semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang terpinggirkan. Kemudian koleksi perpustakaan harus seimbang antara bacaan fiksi dan non fiksi. Menurut standar UNESCO dan *International Federation of Library Association (IFLA)* idealnya koleksi perpustakaan terdiri dari 40 persen bacaan fiksi dan 60 persen non fiksi.

Kedua, koleksi perpustakaan umum mengenai suatu topik harus berimbang antara yang pro dan kontra. Kemudian, jam bukanya tidak harus sesuai jam kerja umum, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan di setiap lokasi, makanya ada perpustakaan keliling. Namun, layanan perpustakaan keliling Indonesia belum sampai ke sana.

Lalu, perpustakaan umum harus dapat diakses dimana-mana dan mengikuti kebutuhan masyarakat. Misalnya koleksi perpustakaan di daerah pantai seyogianya berbeda dengan perpustakaan di daerah pegunungan, menyesuaikan dengan profil penduduk setempat.

Contoh yang baik misalnya *Hongkong Central Public Library* yang melayani semua pemakai dengan beragam media. Baik dewasa maupun anak-anak bukan hanya bisa meminjam buku tetapi juga film dan CD. Selain itu, karena di daerah tersebut banyak tenaga kerja Indonesia, maka mereka menyediakan surat kabar Indonesia seperti Kompas dan Suara Pembaruan.

Dimensi apa saja yang harus diperhatikan dari sebuah perpustakaan?

Umumnya yang paling diperhatikan adalah koleksi, layanan, akses, fasilitas, dan tenaga pustakawannya. Untuk desain interior harus diperhatikan juga profil penggunanya. Ruang baca perpustakaan umum tentu berbeda dengan perputakaan perguruan tinggi yang membutuhkan meja tulis yang lebih nyaman misalnya. Di Indonesia, kenyamanan ruang baca ini sudah mulai diperhatikan meski masih sangat terbatas.

Dari sekitar 4.450 lembaga pendidikan tingg, baru 10 persen yang memiliki perpustakaan yang baik. Jumlah 4.450 itu dinilai Kementerian Riset dan Teknologi terlalu tinggi dibandingkan Tiongkok yang hanya memiliki 5.500 lembaga pendidikan tinggi. Penduduk Cina ada sekitar 1 miliar jiwa sedangkan Indonesia 250 juta jiwa.

Seperti apa Bapak melihat pemahaman tentang kepastakaan pada generasi masa kini?

Sebaiknya pendidikan kepastakaan harus dimulai dari SD sebagai pengguna terlebih dahulu. Sayangnya, perpustakaan sekolah di Indonesia rata-rata masih sangat buruk. Contoh sederhana ya, di Amerika anak TK diajarkan untuk mengantri masuk sekolah. Kemudian

mereka diajari untuk antri toilet. Kemudian mereka ada jam wajib berkunjung ke perpustakaan. Nah, kalau ada materi yang tidak ditemukan di perpustakaan sekolah, baru kemudian mereka berkunjung ke perpustakaan umum. Jadi basis pertama adalah perpustakaan sekolah.

Bagaimana dengan peran perpustakaan untuk mendongkrak minat baca?

Sebetulnya di Indonesia itu bukan minat baca tetapi kebiasaan baca. Minat baca cukup tinggi namun *gak* dilayani dengan baik oleh perpustakaan. Kalau kita masuk ke toko buku. Pasti ada anak atau mahasiswa yang sedang membaca contoh buku. Nah, sebenarnya bacaan itu harus dilayani oleh perpustakaan sekolah.

Survei yang dilakukan oleh Connecticut University menunjukkan bahwa dari 1.000 orang penduduk Indonesia itu hanya 1 yang suka membaca. Sebenarnya hal ini dikarenakan fasilitasnya yang tidak tersedia. Kebiasaan membaca menjadi semakin rendah dengan perkembangan teknologi yang memberi alternatif lain. Tetapi justru sebenarnya bisa diimbangi dengan penyebaran buku-buku elektronik. Secara psikologi minat baca itu dibentuk sampai dengan kira-kira usia 18 tahun. Nah, setelah itu biasanya akan terbangun sendiri seumur hidup sesuai minat. Misalnya minat baca bidang sejarah atau teknologi misalnya.

Bagaimana mengoptimalkan perpustakaan atau taman bacaan?

Harus lebih jelas lagi taman bacaan yang mana. Semula taman bacaan dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajarkan anak-anak membaca. Namun kemudian banyak bermunculan taman bacaan yang dibangun

komunitas tertentu. Orang bebas datang ke sana dengan pakaian apa saja, *luwes* sekali. Mereka juga membacakan dongeng dan bahkan ada yang mengajar mengaji.

Sedikit banyak fenomena ini adalah kegagalan perpustakaan umum karena hal-hal seperti tersebut tidak dilayani oleh perpustakaan umum. Idealnya perpustakaan umum bekerja sama dengan taman bacaan. Sayangnya masih ditemui penyelewengan dana taman bacaan. Setelah mendapat kucuran dana, taman bacaan dibangun seadanya untuk kemudian menghilang enam bulan kemudian. Untunglah masih banyak taman bacaan yang memang benar-benar berdedikasi. Selain itu, koleksi perpustakaan dan taman bacaan sebaiknya memiliki kekhususan sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya perpustakaan di perguruan tinggi bidang bisnis.

Apa saja isu kepastakaan yang tengah hangat dibicarakan pada tingkat internasional?

Perpustakaan harus menyesuaikan diri dengan pembangunan berkelanjutan. Misalnya saja untuk daerah-daerah yang tengah memprioritaskan pembangunan sanitasi maka perpustakaan umumnya harus menyediakan informasi tentang kebersihan dan kesehatan. Lalu untuk daerah yang rawan longsor, banjir, atau tsunami, perpustakaan umumnya harus menyediakan koleksi yang mengedukasi cara mengatasi ragam bencana tersebut. Perpustakaan juga harus mengarah kepada *Sustainable Development Goals*. Di samping itu, perpustakaan perguruan tinggi juga mestinya terbuka untuk membantu penelitian dalam hal itu.

Teks Irma Kesuma Dewi

Mengawal Produk Regulasi Penganggaran

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran,
Direktorat Jenderal Anggaran

Dalam setiap pemerintahan, kehadiran suatu unit yang menangani peraturan mutlak diperlukan. Mengingat seluruh bentuk kinerja organisasi pemerintahan harus berdasarkan Undang-Undang (UU) dan peraturan yang berlaku, maka diperlukan unit khusus yang mengatur harmonisasi peraturan. Begitu pula dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang didukung oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran (HPP).

Tugas utama Direktorat HPP yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran. Implementasinya, Direktorat HPP menjalankan fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran. Selain itu, Direktorat HPP juga berfungsi menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi peraturan penganggaran. Direktorat HPP juga turut memberikan bimbingan teknis serta evaluasi, juga melaksanakan tata usaha direktorat.

Direktur HPP Made Arya Wijaya menjelaskan empat peran



Made Arya
Wijaya, Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Penganggaran

Foto
Arfindo Briyan

strategis unit yang berlokasi di Gedung Sutikno Slamet lantai 19, Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Pertama, menjaga keselarasan atau harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan norma-norma pengelolaan keuangan negara. Kedua, menjaga dan mencegah adanya pembebanan fiskal yang bersifat *mandatory* sebagai dampak dari terbitnya sebuah regulasi. Ketiga, melakukan penataan sistem remunerasi dan sistem jaminan sosial. Keempat, terlibat aktif dalam pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi Nasional.

Menurut Made, sepanjang tahun 2016 DJA telah mengeluarkan 38 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan 2 Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Sedangkan untuk tahun 2017, diusulkan sebanyak 19 PMK dan 2 KMK. Data ini bersumber dari KMK No. 245/KMK.01/2016 tentang Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan KMK yang Bersifat Kebijakan Tahun 2016.

“Perkembangan peraturan penganggaran dari tahun ke tahun di lingkungan DJA cukup dinamis,” tutur Made yang menjabat sebagai Direktur HPP sejak November tahun 2015. Dinamika peraturan penganggaran umumnya berupa revisi dari peraturan yang berlaku tahun sebelumnya. Beberapa contoh diantaranya yaitu PMK tentang Standar Biaya, Rancangan PMK (RPMK) tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL, RPMK tentang Besaran Dana Operasional BPJS, dan sebagainya.

Direktorat HPP tak hanya melakukan harmonisasi peraturan di internal DJA,

namun juga terlibat dalam harmonisasi peraturan yang diprakarsai unit di luar DJA (Kementerian/Lembaga atau unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan). Tak main-main, jumlah peraturan dari unit lain pun tak sedikit. Pada tahun 2016, jumlah peraturan yang memerlukan harmonisasi sebanyak 40 RUU, 196 RPP, dan 91 RPP. Jumlah ini belum termasuk peraturan yang masuk dalam kriteria kumulatif terbuka, seperti pembahasan RUU tentang APBN.

Sumber daya manusia

Dalam menjalankan peranannya, Direktur HPP membawahi 48 orang pegawai yang terbagi ke dalam empat subdirektorat, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Empat subdirektorat itu antara lain Subdirektorat HPP Kementerian/Lembaga, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi.

Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam sebuah organisasi. Maka peningkatan dan penyegaran kapasitas pegawai wajib dilakukan demi meningkatkan produktivitas. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan memfasilitasi pegawai untuk ikut program diklat, *focus group discussion* (FGD), *workshop*, maupun *sharing session* yang diselenggarakan oleh DJA, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian/Lembaga, serta

Kegiatan
Capacity
Building
Direktorat HPP

Foto
Dok. Pribadi



short course baik di dalam dan luar negeri.

Terkait pengembangan kapasitas pegawai, Direktorat HPP telah menginisiasi adanya diklat *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode Perhitungan *Job Pricing* atas kerja sama DJA dan BPPK setiap tahunnya. Diklat ini melibatkan tenaga pengajar dari perguruan tinggi negeri. Sedangkan untuk lebih memperdalam tugas dan fungsi, Direktorat HPP telah dua kali menyelenggarakan *Coffee Morning Talk* bertema “Simple Salary vs Single Salary, RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS” oleh Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi. *Coffee Morning Talk* kedua bertema “Penambahan Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Aparatur Sipil Negara” oleh Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial.

Tantangan

Proses harmonisasi penganggaran tak selamanya berjalan dengan mulus. Made mengungkapkan, seringkali Direktorat HPP baru dilibatkan dalam pembahasan saat memasuki tahap akhir perancangan peraturan perundangan. Contohnya, dalam pembahasan RUU Kebudayaan yang belum lama ini telah disahkan menjadi UU, dengan jelas disebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan dana abadi untuk kebudayaan.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat HPP untuk meyakinkan internal pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat supaya tidak mencantumkan pasal yang bersifat *mandatory* (wajib). Perlu dipahami bahwa pengelolaan keuangan negara sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang keuangan negara, sehingga tidak perlu diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan sektoral.

Made menegaskan, Direktorat HPP akan berupaya untuk mencegah terbitnya regulasi yang mengakibatkan *mandatory spending*. Selanjutnya, Direktorat HPP akan lebih memastikan peraturan-peraturan yang diinisiasi internal DJA, internal Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang substansinya berkaitan dengan penganggaran. Hal ini bertujuan agar peraturan tersebut mampu sinkron dan sejalan dengan regulasi di bidang keuangan negara.

“Ke depan, Direktorat HPP diharapkan akan menjadi gawang fiskal dari sisi regulasi dan menjadi *budget regulation center*,” papar Made. *Budget regulation center* ini merupakan bagian penataan kelembagaan dengan tujuan memfokuskan standar penanganan dan pelayanan yang lebih efisien di bidang penganggaran.

Teks Pradany Hayyu

Kelola Utang Demi Pembangunan

Widjanarko,

Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Selepas subuh dan membantu orang tuanya, anak kecil berbadan kurus itu segera bersiap diri. Tepat pukul lima lebih tiga puluh dini hari, ia harus segera keluar dari rumahnya. Meski dingin dan gelap, anak kecil itu harus tetap berjalan demi menunaikan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Rumahnya yang berada di pinggir kota mengharuskannya untuk berlutut dengan gelap senja dan menyeberangi gang-gang di kampung-kampung. Bahkan kadang kala ia harus menjejak jalanan becek yang terpapar bekas hujan. Untuk mencapai sekolah di pusat kota, ia harus berjalan kaki terlebih dahulu dan menempuh jarak sekitar satu setengah kilometer hanya untuk sampai ke terminal bus. Setelah itu, ia harus melanjutkan perjalanan dengan bus selama 20 menit untuk mencapai sekolahnya. Itulah sepenggal kisah perjuangan masa kecil dari Widjanarko, Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Kisah seperti itu menjadi salah satu pelajaran kehidupan baginya agar selalu menghargai waktu dan agar selalu datang tepat waktu. Menghargai waktu menunjukkan bahwa ia juga memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi. Sebagai anak dari salah satu pejuang kemerdekaan, ia belajar banyak mengenai disiplin dan nasionalisme. Hal itu juga yang mendorong dirinya untuk bisa mengabdikan kepada bangsa dan negara. Salah satunya



Foto
Anas Nur Huda



Widjanarko bersama keluarga

Foto Dok. Pribadi

dengan menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Ia juga terinspirasi dari sosok Menteri Keuangan pekerja keras kala itu, seperti Ali Wardhana, J.B. Sumarlin, dan Radius Prawiro. “Itu kan sudah *passion* saya masuk Kementerian Keuangan sejak kecil. Ingin mengabdikan di Kementerian Keuangan. Kalau saya dengar-dengar dan baca koran *kan* ada Ali Wardhana, Sumarlin, dan Radius Prawiro betul-betul memiliki peran yang vital bagi kemakmuran Indonesia”, tuturnya.

Pengalaman pertama

Pertama kali masuk di Kementerian Keuangan pada tahun 1982, Widjanarko langsung ditempatkan pada unit yang strategis di Direktorat Dana Luar Negeri, Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri (DJMLN). Kala itu, ia langsung ikut mewakili Kementerian Keuangan dalam pembahasan rapat negosiasi dengan *stakeholders* dari luar negeri. Ia pun merasa cukup kaget karena sebagai pegawai baru dan belum terbiasa menghadapi negosiator dari pihak asing dengan standar tinggi. Sadar terkait hal itu, ia pun segera berusaha meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan memperdalam kemampuan bahasa Inggrisnya.

Meski pada saat itu ia hanya memperoleh gaji enam puluh enam ribu rupiah, ia tetap merasa optimis untuk terus belajar dan bekerja. Untuk menutup kekurangan biaya, ia menjadi dosen di beberapa akademi di Jakarta. Ia juga sempat mengalami proses transformasi di tubuh Kementerian Keuangan. Tahun 1988, ia mengalami reorganisasi dan berpindah ke Direktorat Jenderal Anggaran. Sejak itu, ia pun sempat mendalami pengalaman dalam anggaran dan perbendaharaan di berbagai daerah seperti Denpasar, Jambi, Pekanbaru, dan akhirnya kembali ke Jakarta hingga saat ini.

Perpindahan dari kota satu ke kota lainnya tersebut memberikan pengalaman yang tak ternilai bagi Widjanarko. Menurutnya, yang paling penting ketika memimpin organisasi di daerah adalah kemampuan bersosialisasi (*social skills*). Saat ditugaskan di daerah, setiap perwakilan pemerintah harus

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan situasi budaya di daerahnya. “Jadi, itu barangkali *social skill*-nya dan *personal skill*-nya itu yang diperlukan, agar kita betul-betul, ketika berhubungan dengan *customer*, kita itu betul-betul membuat mereka terlayani”, ucapnya.

Puisi dan *teamwork*

Membaca puisi dan sastra angkatan '20,'30 dan '45 merupakan kegiatan yang digemari Widjanarko ketika Sekolah Menengah Pertama dan Atas di Semarang. Salah satu puisi yang menginspirasi hingga kini adalah puisi fenomenal dari Chairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Ia mencoba menerjemahkan semangat kerja keras dan berkorban dari bait ‘sekali berarti sesudah itu mati’ tersebut dalam gaya kepemimpinannya. Dalam setiap kesempatan dengan bawahannya, ia menanamkan prinsip bekerja sebagai sebuah ibadah dan pengabdian. Pesannya, apapun yang dikerjakan memiliki makna dan nilai kontribusi kepada negara. Lebih lanjut, ia berharap hal tersebut juga akan mendorong para pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan visi institusinya, yakni menjadi unit pelaksana evaluasi, akuntansi dan setelmen pengelolaan pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

Hasilnya memang tidak diragukan. Sebagai unit yang memberikan pelayanan terkait evaluasi, akuntansi dan setelemen, banyak risiko yang harus dihadapi dalam pekerjaan, seperti risiko gagal bayar pokok dan bunga utang, risiko salah saji utang dalam laporan keuangan, serta risiko setelmen penerbitan. Dalam kondisi seperti tersebut, ia senantiasa mengingatkan bahwa meskipun setiap unit di bawahnya mempunyai peran yang berbeda, namun sejatinya merupakan satu *teamwork* yang kuat dan harus selalu bersinergi. Kinerja yang optimal dari Laporan Keuangan atas Pengelolaan Utang dan Hibah telah menyumbang peran penting dalam upaya pemerintah

untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pertama kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016. Sumbangan Laporan Keuangan Pengelolaan Utang terhadap capaian WTP LKPP 2016 memberikan makna semakin meningkatnya kepercayaan *rating agency* dan lembaga keuangan internasional terhadap akurasi data utang Indonesia yang dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap *debt sustainability* guna mengantisipasi timbulnya risiko krisis global.

Nasionalisme dan disiplin

Sebagai veteran perang kemerdekaan, ayah Widjanarko, Soebadhi Hadi Wardoyo, dan ibunya, Sri Oerip, memberikan pendidikan yang sangat berharga baginya. Sejak kecil, Widjanarko dididik untuk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Itu lah salah satu alasan kenapa ia memiliki keinginan yang kuat bekerja di Kementerian Keuangan, yakni memberikan pengabdian yang nyata kepada bangsa dan negara. Selain itu, orang tuanya juga memberikan pelajaran kedisiplinan dengan melatihnya untuk disiplin bangun pagi hari. Nilai agama juga ditanamkan dalam dirinya. Ayahnya selalu berpesan agar ia tahan godaan dan menjauhkan dari segala yang dilarang oleh agama. Di sisi lain, sebagai orang yang dibesarkan di Jawa Tengah, ia juga dibekali dengan sikap untuk tidak selalu mengejar materi, tetapi selalu bersyukur, seperti pepatah Jawa “*nrimo ing pandum*”.

Dari ibunya, ia belajar mengenai sikap untuk menghargai orang lain. Ibunya merupakan sosok yang tidak pernah berkeinginan untuk membebani orang lain. “Itu barangkali kalau orang-orang jaman sekarang kan, kalau orangtuanya mapan anaknya terbantu. Kalau anaknya mapan, belum tentu orang tua terbantu. Jadi ya beliau itu walaupun belum dianggap berhasil tapi dia tidak mau minta uang, kecuali dikasih. Padahal

situasinya *kan* kurang. Tapi dia tidak mau memberatkan”, jelasnya. Padahal, uang pensiunannya pun tergolong kecil sebagai veteran pejuang, namun ia selalu merasa cukup.

Buku dan Ronaldo

Salah satu aktivitas yang menjadi hobi Widjanarko adalah bermain bulu tangkis. Setiap hari Selasa, ia rajin untuk menyempatkan diri bermain bulutangkis di kantor pos. Selain itu, ia mempunyai hobi bermain sepak bola ketika masih kecil. Ia juga sempat beberapa kali menjadi tim pesepak bola eksekutif Kementerian Keuangan. Ia juga terinspirasi dengan sikap salah satu pemain bola dunia, Christiano Ronaldo, yang membantu para korban tsunami di Aceh, bahkan Ronaldo sempat mengangkat beberapa korban menjadi anak asuhnya. Widjanarko pun sempat menjadi fans Manchester United yang kala itu merupakan tempat bermain Ronaldo. Terkait dengan pekerjaan kantor, ia memiliki obsesi untuk mengumpulkan artikel terkait pinjaman luar negeri. Tujuannya adalah untuk melakukan penelitian dan sebagai sumber referensi ketika ia ingin menulis buku panduan mengenai pinjaman luar negeri. Buku tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi negara dalam rangka menurunkan pembiayaan negara.

Menjaga keharmonisan

Secara prinsip, Widjanarko bersyukur karena selalu didukung oleh istrinya, Sri Intan Susilowati, dan keempat anaknya, Imam Akbari, Iman Astofi, Adhim Arrauf, dan Salsa Bila Rana. Walaupun ketika pertama kali menjadi pegawai negeri sipil ia hanya memperoleh gaji yang kecil, keluarganya tidak pernah berhenti untuk menyemangatnya. Apalagi kala itu istrinya sempat hamil dan ikut dengannya ke Inggris untuk menemaninya melanjutkan pendidikan magisternya di Birmingham. Untuk itu, ia menerapkan *time management* yang baik untuk mengatur pola kerja di kantor dengan

kehidupan dengan keluarganya.

Terkait komunikasi, ia memanfaatkan momen Ramadhan sebagai sarana untuk lebih mengakrabkan diri dengan anak-anaknya sembari menjalankan ibadah. Ia berusaha agar bisa menjalankan kegiatan sahur, berbuka, sholat subuh, isya, dan tarawih bersama-sama dengan keluarga. Selain itu, peran Bapak dan Kepala Keluarga juga tidak pernah ia lupakan. Ia sering menemani anak-anaknya untuk menonton film baru kesukaan mereka sebelum selanjutnya makan malam bersama. Pada hari Minggu, ia juga sering bertugas menemani istri untuk belanja keperluan sehari-hari.

Harapan

Widjanarko memiliki harapan yang besar terhadap Kementerian Keuangan. Ia merasa ingin terus belajar mengembangkan kemampuannya agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada institusi. Ia merasa masih banyak stigma negatif yang diberikan kepada negara, terutama terkait dengan utang. Untuk itu, ia ingin membantu memberikan pencerahan melalui buku, bahwa tujuan dari kebijakan APBN adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Selain itu, bagi dirinya sendiri, ia ingin terus bekerja dan belajar untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya agar mampu menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi pending matters saat ini. Selain itu, ia juga ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas pinjaman dan hibah, serta mendorong agar hubungan relasi dengan organisasi donor dapat lebih baik dan sesuai dengan aturan pemerintah. “Saya bisa terus meningkatkan kompetensinya agar terus bisa memberikan sumbangsih kepada Kementerian Keuangan. Kepada keluarga sih barangkali ya harapan saya agar terus mendukung saya sepenuhnya sampai kemudian pensiun”, tutupnya.

Teks Abdul Aziz

Makin Kredibel Mengelola Ekonomi

Hari ini ada dua berita gembira untuk Indonesia, pertama kali sejak Republik Indonesia menyusun laporan keuangan & pertanggungjawaban APBN 12 tahun lalu, pemerintah memperoleh opini WTP oleh BPK-RI. Dan Indonesia mendapat peningkatan *rating investment grade* oleh S&P, kenaikan sejak 2011.

Begitu petikan surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditulis Jumat, (19/5). Menurut Menkeu, dua prestasi di atas menjadi wujud kerja keras, ketekunan, ketelitian, dedikasi, dan kesetiaan seluruh pegawai Kemenkeu untuk membangun Indonesia lebih baik. Terkait hal tersebut, Menkeu juga melakukan konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada hari yang sama.

Dalam konferensi pers, Menkeu mengatakan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun ke tahun. Indikatornya dapat terlihat pada peningkatan jumlah laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L) yang mendapatkan opini WTP, dari sebelumnya 56 laporan menjadi 74 laporan. Temuan BPK dalam LKPP juga turun dari 22 laporan menjadi 11 laporan. Selain itu, nilai transaksi antarentitas dan pencatatan transfer masuk dan transfer keluar barang milik negara (BMN) diyakini kewajarannya dan pencatatan saldo anggaran lebih

(SAL) lebih akurat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun LKPP 2016 telah mendapatkan opini WTP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan masih adanya temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan, meskipun tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP 2016.

Opini WTP atas LKPP 2016 adalah opini audit terbaik dan pertama kali dicapai oleh pemerintah selama 12 tahun terakhir. Menkeu sangat mengapresiasi pencapaian ini. “Kami semua di jajaran Kementerian Keuangan merasa bahwa ini adalah suatu yang harus terus dijaga dan dipertahankan,” kata Menkeu.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan belum lama ini, Eric Sugandi, Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness, mengungkapkan bahwa opini WTP diberikan karena transparansi dan akuntabilitas manajemen lembaga pemerintah. Menurut Eric, secara umum sudah terlihat hasil positif dari reformasi birokrasi. “Namun, kita juga harus menunggu hasil investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap Kementerian Desa dan PDT untuk memperoleh status opini WTP,” ujar Eric.

Saat ini, 84 persen K/L telah

mendapatkan opini WTP. Presiden Jokowi berharap agar pada tahun depan, angkanya meningkat menjadi seratus persen. Eric menilai untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu kuncinya adalah ketertiban administrasi. Kegiatan dan penggunaan anggaran yang kerap kali tidak tercatat dengan baik bisa menghambat pencapaian status WTP, walaupun K/L telah banyak menghasilkan *outcome* kebijakan publik yang baik untuk masyarakat.

Dampak opini WTP terhadap LKPP dinilai cukup penting bagi pengelolaan anggaran pemerintah. Agar seluruh K/L bisa mencapai opini tertinggi, tantangannya adalah standarisasi pelaporan keuangan dan pengawasan anggaran di tiap institusi. “Ada beberapa K/L yang masih belum memenuhi standar pelaporan keuangan, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Bhima. Penyebab gagalnya KKP mendapatkan opini WTP dari BPK terkait dengan pembelian atau pengadaan 750 kapal untuk nelayan. Prosesnya baru tercapai 48 kapal, sedangkan di dalam laporan sudah tercatat anggaran Rp209 miliar. “Akhirnya ada berita acara serah terima yang dipermasalahkan oleh BPK. Kasus tersebut jadi pelajaran penting bagi



Pemberian opini WTP terhadap LKPP dari BPK dan peringkat *investment grade* dari S&P menjadi cerminan pengelolaan ekonomi yang menjunjung kredibilitas.

Foto
Dok. Biro KLI
(edited)

K/L lainnya untuk mengikuti prosedur pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya lagi.

Menjaga kredibilitas

Pemberian opini WTP terhadap LKPP dari BPK dan peringkat *investment grade* dari S&P menjadi cerminan pengelolaan ekonomi yang menjunjung kredibilitas. Dalam proses pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2017, kredibilitas itu juga ditunjukkan pemerintah di hadapan DPR. Memasuki pertengahan tahun, pemerintah mengevaluasi kinerja perekonomian dan berupaya menyesuaikan dengan asumsi makro yang ditetapkan sebelumnya dalam APBN agar lebih realistis.

“Pertumbuhan ekonomi mungkin diperkirakan membaik, meskipun kami harus secara hati-hati melihat kuartal kedua dan ketiga. *Outlook*-nya bisa mencapai 5,3 persen, meskipun kami (pemerintah) tetap (pada prediksi) antara 5,1 persen-5,3 persen,” kata Menkeu usai rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (1/6). Terkait pertumbuhan ekonomi, berkaca pada realisasi pertumbuhan kuartal I

2017 sebesar 5,01 persen, pemerintah berpeluang bisa mengerek pertumbuhan melampaui target awal yang ditetapkan dalam APBN pada angka 5,1 persen.

Selanjutnya menyangkut harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Prices/ICP*) juga perlu dilakukan penyesuaian. Sepanjang Januari-April, harga rata-rata ICP menembus USD50,66 per barel. Capaian ini lebih besar sekitar 58,56 persen dari rata-rata ICP tahun lalu USD31,95 per barel dan lebih tinggi dari asumsi APBN 2017 sebesar USD45 per barel.

Menkeu melihat ada potensi peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) minyak dan gas bumi (migas) sepanjang tahun ini. Bahkan, peningkatannya mampu mengompensasi target penerimaan pajak yang diperkirakan meleset. “Kami memperkirakan, mungkin sekitar 13 persen,” ujar Menkeu.

Dari sudut pandang pengamat, asumsi ekonomi makro dalam Rancangan APBN 2017 dinilai masih realistis, tapi lebih optimistis dibandingkan dengan asumsi-asumsi pada APBN

2017. “Khususnya di batas atas *range* pertumbuhan ekonomi yang 5,3 persen. Tren kenaikan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir mungkin mempengaruhi optimisme pemerintah ini,” kata Eric.

Kenaikan harga minyak berpengaruh positif terhadap pendapatan negara sejak pemerintah mengubah mekanisme pemberian subsidi BBM di tahun 2015 melalui penghapusan subsidi untuk premium dan pemberian *fixed subsidy* untuk solar. Dengan demikian, porsi pengeluaran pemerintah untuk subsidi terhadap APBN tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Terkait penyesuaian realisasi pendapatan negara, Eric melihat perubahan yang diajukan pada pos tersebut masih cukup wajar. Harga ICP saat ini sudah jauh di atas asumsi APBN 2017 sebesar USD45 per barel. “Saya memperkirakan harga ICP akan cenderung berfluktuasi di kisaran USD50-55 per barel sampai akhir 2017,” kata dia.

Sementara itu, Bhima memiliki catatan tersendiri dalam proses

” Komentor Pakar

pembahasan Rancangan APBN-P 2017. “Terkait asumsi pertumbuhan yang naik dari 5,1 menjadi 5,3 persen, pemerintah boleh optimis mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi perlu mencermati kondisi eksternal yang belum mendukung,” ujar Bhima. Contohnya adalah pertumbuhan ekonomi dunia versi World Bank yang hanya 2,7 persen jika dibandingkan secara *year on year*. Di samping itu, ekonomi mitra dagang terbesar, China, diprediksi stagnan dibandingkan 2016. “Pengaruh terhadap ekspor harus diantisipasi,” katanya lagi.

Berikutnya terkait asumsi harga minyak mentah atau ICP, Bhima setuju adanya penyesuaian dalam RAPBN-P 2017. Yang menjadi catatan Bhima, kenaikan sebaiknya tidak melebihi USD48-50 per barel. Hal ini berkaitan dengan konflik di Qatar dan pasokan minyak Amerika Serikat yang meningkat, sehingga bisa mengoreksi harga minyak dunia. “Jika asumsi ICP dibuat terlalu tinggi atau optimis, sedangkan harga minyak ternyata menurun, dampaknya target PNBP bisa meleset,” kata Bhima.

Pengaruh kenaikan harga minyak pasti akan berdampak pada penerimaan negara, terutama dari sektor PNBP Migas. Saat ini, harga minyak bergerak antara USD48-50 per barel. Oleh karena itu, Bhima memprediksi dalam waktu dekat dipastikan akan ada perubahan asumsi harga minyak mentah. “Dengan naiknya asumsi ICP, maka PNBP Migas akan naik sekitar 15 persen dari sebelumnya Rp63,7 triliun menjadi Rp73,2 triliun,” ujar Bhima.

Teks Dwinanda Ardhi



Eric Sugandi
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness

Untuk mencapai angka pertumbuhan di atas lima persen tahun ini dibutuhkan kerja keras dari pemerintah, utamanya dalam menjaga momentum pertumbuhan domestik dan kondisi eksternal yang mendukung. Kekhawatiran saya saat ini adalah risiko melemahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga karena pemerintah terus menerus menaikkan *administered prices* dan seberapa jauh harga minyak bumi di pasar global bisa naik dan kenaikan harganya.

Secara umum saya berharap agar proses pembahasan RAPBN-P 2017 bisa lancar dan selesai tepat pada waktu. Saat ini pemerintahan Presiden Jokowi memperoleh dukungan mayoritas di DPR, jadi semestinya proses pembahasan bisa berjalan dengan lancar.



Bhima Yudhistira,
Pengamat Ekonomi INDEF

Saya berharap proses pembahasan RAPBN-P 2017 dapat berjalan dengan cepat, tetapi tanpa menghilangkan beberapa faktor utama seperti pertimbangan perubahan kondisi makroekonomi. Utamanya yang berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas, inflasi, serta kondisi penerimaan perpajakan. RAPBN-P 2017 seharusnya bisa lebih mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Alokasi anggaran untuk bantuan sosial bisa ditingkatkan sebagai *safety net* terhadap kondisi perekonomian yang masih belum stabil, terutama daya beli yang menurun. Di sini saya rasa peran DPR cukup penting sebagai pemberi masukan dalam pembahasan RAPBN-P 2017.



POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
proudly presents



NATIONAL ACCOUNTING CHALLENGE

THE BIGGEST NATIONAL ACCOUNTING COMPETITION

2017

MEMPEREBUTKAN PIALA BERGILIR MENTERI KEUANGAN

AVAILABLE FOR ALL D3, D4 & S1 STUDENTS
(PKN STAN NOT QUALIFIED)

Registration fee :
300k /Team
Each team consists of 3 participants



Booklet peserta :

nac-idn.com/booklet

Prize!

1st	IDR 20.000.000
2nd	IDR 15.000.000
3rd	IDR 10.000.000
4th	IDR 5.000.000
5th	IDR 2.500.000

Find us on:

@nac_idn nac-idn.com
 @jfs6427r @nac_idn
 National Accounting Challenge 2017

NARAHUBUNG:

Albe (085875445054)
Anas (082187659456)

Sponsored by :



Media Partner :



Supported by :



Pengakuan Terhadap Kredibilitas Fiskal

Teks Dwi Anggi Novianti
Kepala Subbidang Ekonomi dan Keuangan Internasional
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan *)



Salah satu kunci utama peningkatan peringkat utang (*rating*) Indonesia menjadi *investment grade* oleh Standard & Poor's (S&P) terletak pada perbaikan signifikan manajemen fiskal pemerintah. Dalam laporannya, S&P melihat langkah penyusunan anggaran yang lebih realistis telah membantu mengurangi risiko akan terjadinya pelebaran defisit jika penerimaan negara berada di

bawah target (*shortfall*).

Selama ini, aspek fiskal menjadi salah satu titik perhatian utama di dalam penilaian kemampuan membayar kembali kewajiban suatu entitas (*creditworthiness*). Oleh karena itu, perolehan predikat *investment grade* Indonesia dari S&P

selain menandai prospek investasi yang lebih baik di masa mendatang, juga menjadi simbol pengakuan atas perbaikan kredibilitas fiskal pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan fiskal—dalam hal ini APBN—terasa cukup intens. Situasi ekonomi global yang tidak begitu menguntungkan telah membuat aktivitas ekspor dan impor mengalami penurunan serta membuat harga komoditas melemah. Keduanya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara dalam APBN. Pendapatan yang bersumber dari minyak dan gas (pajak dan penerimaan negara bukan pajak) yang pada tahun 2011 mencapai sekitar 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun menjadi 2,9 persen dan 1,1 persen pada 2014 dan 2015. Sementara itu, penerimaan dari pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar) dalam periode yang sama mengalami penurunan dari 0,7 persen terhadap PDB menjadi sekitar 0,4 persen dan 0,3 persen.

Terlepas dari adanya tekanan tersebut, target pendapatan negara secara keseluruhan sulit untuk dikompromikan, mengingat adanya kebutuhan belanja untuk pembangunan yang masih tinggi. Target pendapatan negara yang ditetapkan di dalam APBN (dan APBNP) tahun 2014 dan 2015 tetap dipatok tinggi, dengan mendorong pertumbuhan penerimaan pajak non minyak dan gas yang besar. Target yang tinggi tersebut, pada akhirnya tidak dapat tercapai dan menciptakan *shortfall* yang cukup substansial dan membuat defisit APBN menjadi melebar. Pada 2014, dari total pendapatan negara yang ditargetkan 16,3 persen terhadap PDB, hanya tercapai 14,7 persen. Sementara pada 2015, dari target pendapatan negara 15,1 persen terhadap PDB, yang terealisasi sebesar

13,1 persen. Tercatat realisasi defisit fiskal tahun 2013–2015 rata-rata sebesar 2,4 persen, meningkat dibandingkan rata-rata tiga tahun sebelumnya yakni 1,3 persen. Sebagai konsekuensi, tingkat utang publik terdorong hingga berada di kisaran 27–28 persen terhadap PDB.

Di dalam metodologi penilaian rating oleh S&P, skor untuk fiskal menjadi menurun dengan adanya pelebaran utang publik dari 24,7 persen pada 2014 menjadi 27,4 persen pada 2015, serta dengan adanya kinerja pendapatan negara yang kurang menggembirakan (secara teknis, salah satu ukuran yang dipakai dalam skor fiskal adalah rasio belanja bunga terhadap pendapatan negara). Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menahan S&P untuk memberikan *upgrade investment grade* tahun lalu.

Langkah perbaikan

Memahami adanya tekanan pada APBN, terutama risiko *shortfall* dan pelebaran defisit, pada akhir 2016 pemerintah mengambil langkah strategis. Secara umum, langkah tersebut terdiri atas dua bagian besar, yaitu menurunkan target pendapatan negara (khususnya penerimaan pajak) dan efisiensi belanja yang dilakukan dengan selektif. Kedua strategi tersebut bermuara untuk menjaga defisit fiskal pada tingkat yang aman. Pemerintah menyatakan bahwa langkah tersebut ditempuh untuk memperbaiki kredibilitas fiskal.

Rasionalisasi target penerimaan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja perdagangan internasional masih terdeteriorasi dan harga komoditas masih berada dalam tren pelemahan. Selain itu, tren pertumbuhan ekonomi yang masih melambat juga membuat upaya *extra effort* harus disesuaikan dengan kapasitas ekonomi yang sesungguhnya. Untuk

itu, target penerimaan perpajakan pada 2016 diturunkan sebesar Rp219 triliun dari nilai yang tercantum di dalam APBN Perubahan.

Penurunan target penerimaan tersebut tidak menghilangkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan terhadap penerimaan perpajakan nasional. Pada waktu bersamaan, program amnesti pajak sebagai sebuah terobosan kebijakan terus bergulir. Hal tersebut juga dilandasi kesadaran potensi penerimaan pajak yang belum tergalai masih cukup besar dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Amnesti pajak bersama dengan penetapan target pajak yang lebih realistis menjadi dua tools untuk membentuk kebijakan pendapatan negara yang lebih kredibel.

Dengan adanya penurunan target pendapatan negara pada 2016, pemerintah juga melakukan penyesuaian di sisi belanja untuk memitigasi risiko pelebaran defisit yang eksekutif. Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah melakukan pemotongan anggaran yang selektif dan menyoal pada belanja yang sifatnya kurang produktif. Beberapa sasaran utama efisiensi tersebut adalah pada komponen belanja honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*, operasional perkantoran, pemeliharaan dan pengadaan gedung pengadaan kendaraan, serta kegiatan yang belum dikontrakan atau diperkirakan tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun. Sementara belanja yang lebih bersifat produktif dan mendukung program prioritas kementerian/lembaga (K/L) tetap dipertahankan.

Selain terhadap K/L, efisiensi juga diberlakukan terhadap transfer ke daerah dan dana desa (TKDD),

SUKA BEPERGIAN ATAU BELANJA ONLINE DARI LUAR NEGERI ? SUDAH TAHU ATURANNYA BELUM ?

yaitu melalui pemotongan serta penundaan pembayarannya. Kebijakan ini juga dilakukan dengan selektif dan memperhatikan tingkat penyerapan alamiah, kapasitas keuangan daerah, serta posisi saldo kas daerah. Total belanja negara yang diperkirakan dihemat dari kegiatan efisiensi tersebut mencapai Rp184,3 triliun, yang terdiri atas penghematan melalui pemerintah pusat sebesar Rp111,4 triliun dan dan TKDD sebesar Rp73 triliun. Realisasi APBN Perubahan 2016 menunjukkan bahwa strategi konsolidasi fiskal tersebut merupakan langkah yang tepat, sehingga tidak terjadi deviasi yang terlampaui lebar pada pos-pos APBN serta ketahanan fiskal dapat terjaga. Realisasi defisit fiskal terkendali sebesar Rp308,3 triliun (2,49 persen terhadap PDB), sedikit di bawah outlook setelah penghematan yakni Rp315,7 triliun. Strategi konsolidasi fiskal ini dipandang berhasil mengurangi risiko fiskal dan menjadi salah satu penilaian utama yang mendorong *upgrade rating* Indonesia menuju *investment grade* oleh S&P.

Penilaian S&P dan perbaikan fiskal

Penilaian oleh lembaga *rating* seperti S&P menjadi suatu masukan yang berharga bagi pemerintah. Hal tersebut menjadi cerminan untuk terus melakukan perbaikan pengelolaan ekonomi, termasuk fiskal. S&P selama ini dikenal sebagai lembaga *rating* yang paling *rigid* di dalam melakukan penilaian *rating*. Di dalam pengalaman Indonesia sendiri, terdapat *gap* sekitar lima tahun antara pemberian peringkat *investment grade* dari S&P dengan dua lembaga *rating* utama lainnya, yakni Fitch dan Moody's.

Di dalam rentang waktu tersebut, fiskal menjadi salah satu aspek yang menjadi sorotan S&P. Yang perlu dicatat

sebetulnya, pemerintah Indonesia telah banyak melakukan perbaikan termasuk di area-area yang menjadi sorotan S&P. Sebagai contoh, sejak 2012, salah satu isu yang menjadi perhatian S&P dan menghambat lembaga tersebut untuk memberikan *investment grade* pada Indonesia adalah mengenai beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. Perubahan telah dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut subsidi untuk premium dan menetapkan skema subsidi tetap untuk solar, sehingga membuat beban subsidi di dalam APBN berkurang signifikan. Penurunan beban subsidi juga membuka ruang fiskal yang lebih lebar dan memungkinkan untuk dilakukannya realokasi terhadap belanja lain yang lebih produktif antara lain infrastruktur dan bantuan sosial. Akan tetapi, langkah perbaikan kinerja fiskal tersebut tidak serta merta membuat S&P melakukan *upgrade rating* Indonesia menjadi *investment grade*.

Penutup

Status *investment grade* dari S&P sudah selangkah diproleh oleh Indonesia beberapa tahun yang lalu. Selain karena kondisi fundamental ekonomi yang secara umum terus menunjukkan ketahanan di tengah situasi global yang bergejolak, kredibilitas fiskal sebetulnya telah dibangun secara bertahap dan pemerintah telah mengerjakan beberapa "pekerjaan rumah" penting yang sering disyaratkan oleh S&P untuk memperoleh *investment grade*. Salah satu yang paling monumental tentunya ketika dilakukan reformasi subsidi energi beberapa tahun lalu. Selain itu, Indonesia selalu disiplin di dalam menjaga defisit fiskal di bawah batas tiga persen serta memiliki tingkat utang publik yang sangat rendah sebagaimana

amanat undang-undang. Bisa dikatakan wujud pengelolaan fiskal tersebut adalah salah satu yang terbaik di dunia dan menjadi sumber pengakuan lembaga *rating* lain dalam pemberian level *investment grade*.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia mengalami tekanan fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Langkah konsolidasi fiskal 2016 di atas merupakan sebuah upaya koreksi strategis yang menegaskan bahwa kredibilitas kebijakan tetap terus menjadi prioritas untuk memastikan APBN yang sehat dan berkesinambungan. Hal tersebut secara tersendiri sudah merupakan suatu pengaruh positif bagi perekonomian Indonesia. Ibarat *the icing on the cake*, kredibilitas tersebut pun akhirnya menjadi kunci yang disambut oleh S&P dengan pemberian status *investment grade*.

Investment grade dari S&P menjadi penegas bahwa kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia dan kebijakan pemerintah membaik. Status tersebut harus digunakan sebagai momentum untuk terus bergerak ke arah perbaikan. Saat ini status *investment grade* yang dimiliki Indonesia baru berada di level BBB- (atau Baa3 dalam penilaian Moody's), atau klasifikasi *investment grade* yang terendah. Agar manfaat ekonomi yang lebih besar dapat diperoleh, peringkat tersebut harus terus ditingkatkan. Untuk mencapai hal tersebut, keberlanjutan kredibilitas fiskal menjadi hal penting.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Jangan lupa lapor jika bawa uang tunai atau instrumen pembayaran lain sejumlah **100 juta rupiah** atau lebih !

Pembawaan barang dari luar negeri yang harganya lebih dari **250 USD** wajib membayar Pajak dan Bea Masuk



Hati-hati apabila dititipi barang oleh orang lain, bisa jadi itu **NARKOBA** lho..

**YUK KITA BANGUN DAN LINDUNGI NEGERI !!
UNTUK INDONESIA MAKIN BAIK**

Belanja online dari luar negeri di atas **FOB 100 USD** juga kena Pajak dan Bea Masuk ya..

INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI



www.beacukai.go.id

BEA CUKAI
Makin Baik
MENGABASI & MELAYANI

Berniat Terus Meneliti Tikus

Sebagai peneliti muda, prestasi Heru Handika tak bisa dianggap rata-rata. Heru—panggilan akrab pemuda asal Padang, Sumatera Barat itu—menjadi salah satu peneliti dalam tim internasional yang menemukan tikus hidung babi di Sulawesi pada 2015. Tikus tersebut berhasil dicatatkan sebagai genus baru. Kini, Heru tengah merampungkan pendidikannya di program Master of Science (Zoology) di the University of Melbourne, Australia dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kepada Media Keuangan, Heru mengatakan bahwa tikus hidung babi adalah salah satu dari 39 jenis tikus yang saat ini telah diketahui. Tikus itu melengkapi jenis tikus karnivora di Sulawesi. Di dunia, tikus hidung babi termasuk *shrew-rats* (tikus cecurut) yang hanya hidup di Indonesia dan Filipina. Gunung Dako, Tolitoli, Sulawesi Tengah, tempat ditemukannya tikus hidung babi, merupakan kawasan yang belum pernah disurvei sebelumnya. “Penemuan tikus hidung babi membuka kemungkinan yang mendukung teori bahwa Sulawesi bukan hanya memiliki fauna unik di pulaunya, melainkan juga di kawasan penemuan, sehingga tidak terdapat di tempat lain di pulau yang sama,” kata Heru.

Heru telah meneliti tikus selama tujuh tahun dan mengaku tidak jijik sama sekali dengan hewan pengerat itu. “Apalagi tikus yang saya teliti bukan tikus yang hidup di pasar atau perumahan,” ujarnya. Fokus penelitian pemuda kelahiran 12 Juni 1990 tersebut adalah tikus yang hidup di kawasan hutan dan

pegunungan. Menurut Heru, tikus-tikus yang ditelitinya memiliki bentuk sangat menarik. Ketika menemukan tikus, yang dilihatnya adalah keunikan dari setiap ekor. Saking senangnya, Heru pernah sampai melompat-lompat sendiri di hutan ketika menemukan tikus jenis baru. “Bagi sebagian orang mungkin ini aneh. Namun, ketika pekerjaan yang dilaksanakan menjadi sebuah *passion*, yang ada bukan lagi rasa jijik, tapi sebuah kesenangan,” katanya lagi.

Tikus saat ini diketahui sebagai mamalia dengan jumlah jenis terbanyak, yaitu sekitar 30 persen dari jumlah total spesies mamalia. Tikus ada di mana-mana dan menguasai berbagai macam tipe habitat, mulai dari dari gurun yang kering hingga ke wilayah tropis. Di Indonesia sendiri, tikus dapat ditemukan mulai dari tempat ketinggian setara permukaan laut hingga puncak gunung. “Tidak ada jenis mamalia lain, selain manusia tentunya, yang tingkat adaptasinya seperti tikus,” ujar Heru. Kemampuan seperti ini menjadikan tikus sebagai model yang tepat untuk mempelajari adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Di Indonesia, belum banyak penelitian tentang tikus. “Kesempatan itu yang saya ambil,” kata dia menambahkan.

Penelitian lanjutan

Program Master of Science (Zoology) di the University of Melbourne yang diambil Heru bersifat *coursework*, tetapi 63 persen kurikulumnya merupakan penelitian. Di sana, mahasiswa hanya mengambil enam mata kuliah di dalam kelas. “Saya banyak mempelajari tentang

pengelolaan hewan liar, sistem hutan, etika dalam sains dan penelitian, serta bagaimana mengkomunikasikan sains ke sesama peneliti maupun masyarakat luas,” ujar Heru.

Penelitian tesis yang diambil Heru memiliki fokus pada persebaran dan evolusi spesies tikus di semenanjung utara Sulawesi. Dari penelitian itu, dia banyak belajar tentang evolusi spesies tikus, tingkat adaptasinya dengan lingkungan, dan pengaruh batasan geografis dalam evolusi species. Manfaat terbesar dari penelitiannya kali ini adalah untuk manajemen konservasi. “Namun, juga bisa bermanfaat bagi penelitian kesehatan dalam ruang lingkup manajemen parasit,” ujar Heru.

Heru memutuskan untuk melanjutkan kuliah di the University of Melbourne antara lain karena ketertarikannya terhadap aktivitas penelitian sang supervisor. “Bagi kami yang kuliahnya lebih banyak penelitian, pilihan *supervisor* jauh lebih berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kami selama berkuliah,” kata dia. Hal ini karena dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa akan lebih banyak menghabiskan waktu meneliti dan berkomunikasi dengan *supervisor* dibandingkan menghadiri kelas.

Mendaftar LPDP

Untuk bisa berkuliah di Australia, Heru harus melalui perjuangan lulus seleksi LPDP. Butuh waktu satu tahun baginya untuk dipanggil menghadapi tes wawancara. “Saya beberapa kali memasukkan ulang aplikasi beasiswa

saya karena tak kunjung dipanggil untuk wawancara,” katanya.

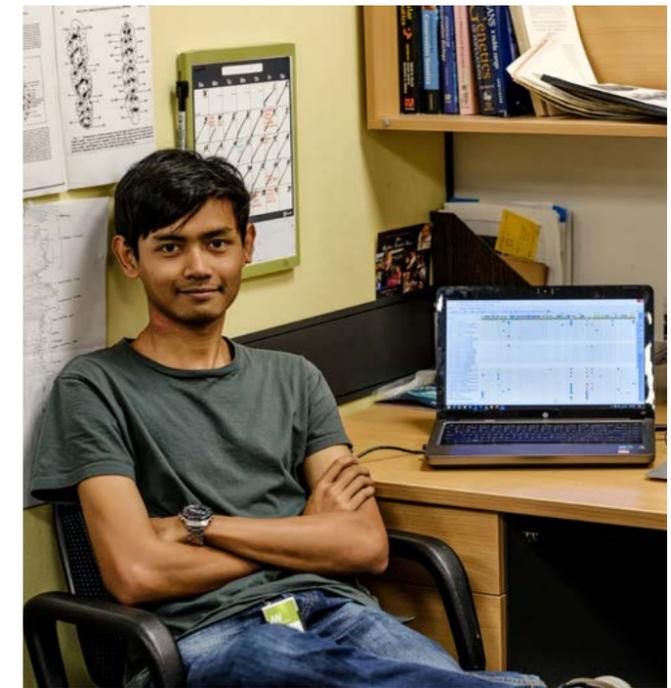
Ketika kesempatan itu datang, Heru terlanjur ambil bagian dalam penelitian vertebrata di Pulau Samar, Filipina. Tempat seleksi wawancara LPDP yang dipilihnya saat itu adalah Jakarta. “Waktu itu wawancara dilaksanakan dalam tiga *batch*. Jika saja saya mendapatkan jadwal wawancara pada *batch* kedua dan ketiga, saya tidak mungkin bisa mengikuti wawancara karena saat itu sudah berada di Filipina,” ujar Heru. Kesempatan yang dinantikannya selama setahun lenyap seketika.

Heru berada dalam dilema. Namun, akhirnya dia memutuskan untuk tetap berangkat ke Filipina. “Itu adalah kesempatan emas karena saya menjadi satu-satunya orang Indonesia dalam penelitian yang kerja sama antara Universitas Filipina dan Kansas University,” kata Heru. Dalam keberangkatan ke negara tetangga, dia menyimpan doa. “Jika beasiswa LPDP menjadi milik saya, pasti saya akan tetap mendapatkannya,” ujarnya melanjutkan cerita.

Doa Heru terkabul. LPDP memberi kesempatannya melakukan wawancara di *batch* pertama. Surat-surat undangan penelitian di Filipina menjadi alasan penguat baginya meyakinkan pewawancara. Di Filipina, Heru tinggal di hutan selama 40 hari. Setelah penelitian selesai dan mendapat akses internet, kabar baik itu datang. “Saya lulus wawancara LPDP dan mendapat undangan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan,” ujar Heru.

Aktivitas lain

Selama hampir dua tahun melanjutkan studi di Negeri Kanguru, Heru juga menjadi *research student* di Museum Victoria. Hal ini sudah menjadi bagian kerja sama antara Museum



Heru telah meneliti tikus selama tujuh tahun dan tidak pernah merasa jijik ketika melakukannya.

Foto Dok. Pribadi

Victoria and kampusnya. Mahasiswa mendapatkan ruang sendiri di museum sebagai tempat belajar dan diberi fasilitas untuk melaksanakan penelitian. Keseharian Heru lebih banyak dihabiskan untuk melaksanakan penelitian. Namun, dalam beberapa kesempatan, dia masih terlibat dalam aktivitas yang dilaksanakan pengelola museum. Salah satunya pada kegiatan SmartBar, di mana Heru mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan teknik pengawatan spesimen hewan di depan warga Melbourne.

Heru juga terlibat dalam riset kerja sama antara Museum Victoria dan University of California di Amerika Serikat serta Museum Bogoriense di Indonesia. Sebagai peneliti, dia telah menjadi anggota the American Society of Mammalogists. Di luar itu, Heru pun aktif di perhimpunan mahasiswa LPDP Victoria. “Saya juga aktif menulis di *AustraliaPlus*,” ujarnya. Tulisan-tulisan Heru yang banyak membahas pendidikan dan perjuangan kuliah ke luar negeri juga muncul di media-media nasional yang bekerja sama dengan *AustraliaPlus*, seperti *Detik.Com*, *TribunNews*, *Tempo*, dan *MetroTVNews*.

Rencana ke depan

Saat ini Heru bersiap dengan gelar S2 barunya. Setelah lulus, dia ingin melanjutkan penelitian-penelitiannya, termasuk soal tikus. “Saya masih mempunyai kerja sama penelitian sekitar dua hingga tiga tahun ke depan dengan menggunakan dana riset yang sama,” kata dia. Selain itu, Heru juga berencana melanjutkan kuliah S3. Dia mengungkapkan masih memiliki data sangat banyak yang belum diolah. Data ini sangat penting untuk pemahaman kita tentang pulau Sulawesi dan keunikannya. “Saya membutuhkan pendidikan dan *training* yang lebih baik agar pengolahannya terarah. Kuliah S3 akan menjadi solusi yang lebih jelas bagi perkembangan penelitian saya,” ujar Heru lagi.

Cita-cita berikutnya adalah pulang ke tanah air dan mengajar di salah satu universitas di Indonesia. Heru berharap dapat berkontribusi dalam upaya menjadikan sains sebagai bagian penting dalam kehidupan di Indonesia. “Semoga negara kita bisa menjadi pusat ilmu pengetahuan hayati di masa akan datang,” kata Heru.

Teks Dwinanda Ardhi

Perppu Nomor 1 Tahun 2017: Buka-bukaan Data dan Perlindungan Data

Teks Johana Lanjar Wibowo, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Belum lama ini pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini menimbulkan keresahan di sebagian kalangan masyarakat. Bagaimana menjamin data pribadi tersebut tidak disalahgunakan?

Akses Informasi Keuangan Oleh DJP

Keresahan masyarakat tersebut bukan tanpa sebab. Target penerimaan pajak selalu tidak tercapai selama satu dekade terakhir. Salah satu penyebabnya adalah adanya penghindaran pajak.

Melalui Perppu ini, kewajiban merahasiakan data nasabah tidak berlaku dan seolah-olah kewenangan akses informasi keuangan oleh DJP baru diberikan sekarang. Padahal, sebelumnya DJP telah diberi kewenangan untuk mengakses informasi keuangan. Hal ini sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berbunyi “Apabila dalam menjalankan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.”

Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat UU KUP dijelaskan, “Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut diabaikan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan diabaikan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan”. Selanjutnya, pasal 35A UU KUP juga mengatur setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk wajib memberi data dan informasi terkait perpajakan kepada DJP.

Salah satu hambatan sebelum Perppu ini terbit adalah untuk mendapat keterangan terkait data dan informasi keuangan, DJP harus terlebih dahulu memiliki permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, atas permintaan tertulis tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk memberi keterangan atau bukti yang diperlukan. Hal ini memerlukan birokrasi dan waktu yang panjang. Jika data yang diperlukan baru tersedia atau bahkan tidak tersedia hingga saat jatuh tempo pemeriksaan, hasil pemeriksaan pajak tidak akan

maksimal.

Hambatan ini sebenarnya sudah teratasi dengan aplikasi Akasia-Akrab yang membantu mempercepat proses permintaan keterangan informasi rekening. Hal yang baru dalam Perppu ini adalah kewajiban lembaga jasa keuangan dalam menyampaikan laporan informasi keuangan secara rutin kepada DJP. Penyampaian laporan ini paling lama empat bulan setelah akhir tahun kalender.

Sebagai contoh, DJP akan mendapat laporan rekening keuangan tahun 2017 paling lambat akhir April 2018. Selain menerima laporan, DJP juga berwenang untuk meminta informasi dan keterangan dari lembaga jasa keuangan atau entitas lain. Sebaliknya, pihak-pihak tersebut wajib memberikan informasi, bukti, atau keterangan yang diminta tersebut.

Informasi keuangan yang dihimpun akan digunakan sebagai basis data perpajakan. Akan tetapi, data informasi tersebut hanya dapat digunakan dalam pengawasan, pemeriksaan, atau penyidikan pajak mulai Mei 2018. Hal ini tentunya sembari menunggu persetujuan DPR dan Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk teknisnya.

Hadirnya Perppu ini semestinya justru membuat kepercayaan masyarakat kepada otoritas perpajakan semakin meningkat. Perppu ini akan menciptakan keadilan dari sisi pembayaran pajak. Orang dengan penghasilan lebih tinggi dapat dipastikan membayar pajak lebih tinggi. Jadi, kalau sudah melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar mengapa harus resah?

Perlindungan Data Keuangan Pribadi

Dalam Perppu ini, Menteri Keuangan atau pegawai Kementerian Keuangan

yang melaksanakan tugas akses dan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan tidak dapat dituntut secara perdata. Demikian pula dengan pimpinan dan pegawai OJK, lembaga jasa keuangan, dan entitas lain yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan. Selain itu diatur pula sanksi pidana atau denda bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban. Hal yang mungkin terlewat dalam penyusunan Perppu ini adalah perlindungan data keuangan pribadi masyarakat agar tidak disalahgunakan.

Rencananya perlindungan data keuangan pribadi akan diatur dalam sebuah Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Saat ini prosesnya masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU). Dalam RUU tersebut diatur hak dan kewajiban dalam rangka perlindungan data pribadi.

Data pribadi meliputi data yang bersifat umum dan spesifik. Data keuangan pribadi termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik. Selain itu, RUU tersebut juga mengatur sanksi pidana atau administrasi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban, termasuk di dalamnya perlindungan data keuangan dalam basis data perpajakan oleh DJP ataupun OJK.

Penulis berpandangan, RUU ini dapat menjadi cikal bakal terwujudnya *Single Identity Number (SIN)*. Adanya SIN akan membantu integrasi data keuangan untuk mencapai basis data perpajakan yang valid dan akurat. SIN dan integrasi data keuangan menjadi faktor penentu tercapainya penerimaan pajak. Dengan begitu, upaya pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terealisasi.

Ilustrasi
Arfindo Briyan



Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Perpajakan

Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan PMK Nomor 73/PMK.03/2017

Krisis global pada 2008 lalu memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian dunia. Pemerintah di sejumlah negara telah melakukan berbagai cara untuk menyehatkan sektor keuangan dan memberikan stimulus ekonomi agar dunia bisa bangkit dari krisis. Namun, krisis ekonomi dan keterbatasan akses informasi keuangan dimanfaatkan sebagian pengusaha melalui praktik penghindaran pajak, sehingga menurunkan basis pajak. Modusnya dengan menggeser profit, lalu menyimpan keuntungan di negara-negara suaka pajak (*tax havens*).

Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara yang tergabung dalam G20 bersepakat meningkatkan kerja sama perpajakan dan memberikan mandat kepada Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menyusun model *Foreign Account Tax Compliance* yang sebelumnya diterapkan oleh Amerika Serikat. Hasilnya, G20 menyepakati penerapan *Automatic Exchange of Financial Account Information* (AEOI) pada tahun 2017 atau 2018 berdasarkan *Common Reporting Standard*.

Bersama 99 negara lain yang tergabung dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global

Forum), Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) dan *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA). Dalam perjanjian tersebut, 50 negara mulai menerapkan AEOI pada 2017, sedangkan Indonesia berkomitmen menerapkannya pada 2018 bersama dengan 49 negara lainnya.

Sebagai persyaratan implementasi AEOI, negara yang telah berkomitmen harus memiliki aturan setingkat undang-undang sebagai aturan primer dan aturan di bawah undang-undang sebagai aturan sekunder. Aturan memuat kewajiban lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan kepada otoritas perpajakan serta memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk mempertukarkan informasi tersebut dengan negara lain. Batasan waktu yang harus dipenuhi adalah 30 Juni 2017. Apabila tidak dapat memenuhi dalam jangka waktu tersebut, Indonesia akan dilaporkan oleh Global Forum sebagai negara yang tidak bisa memenuhi komitmen.

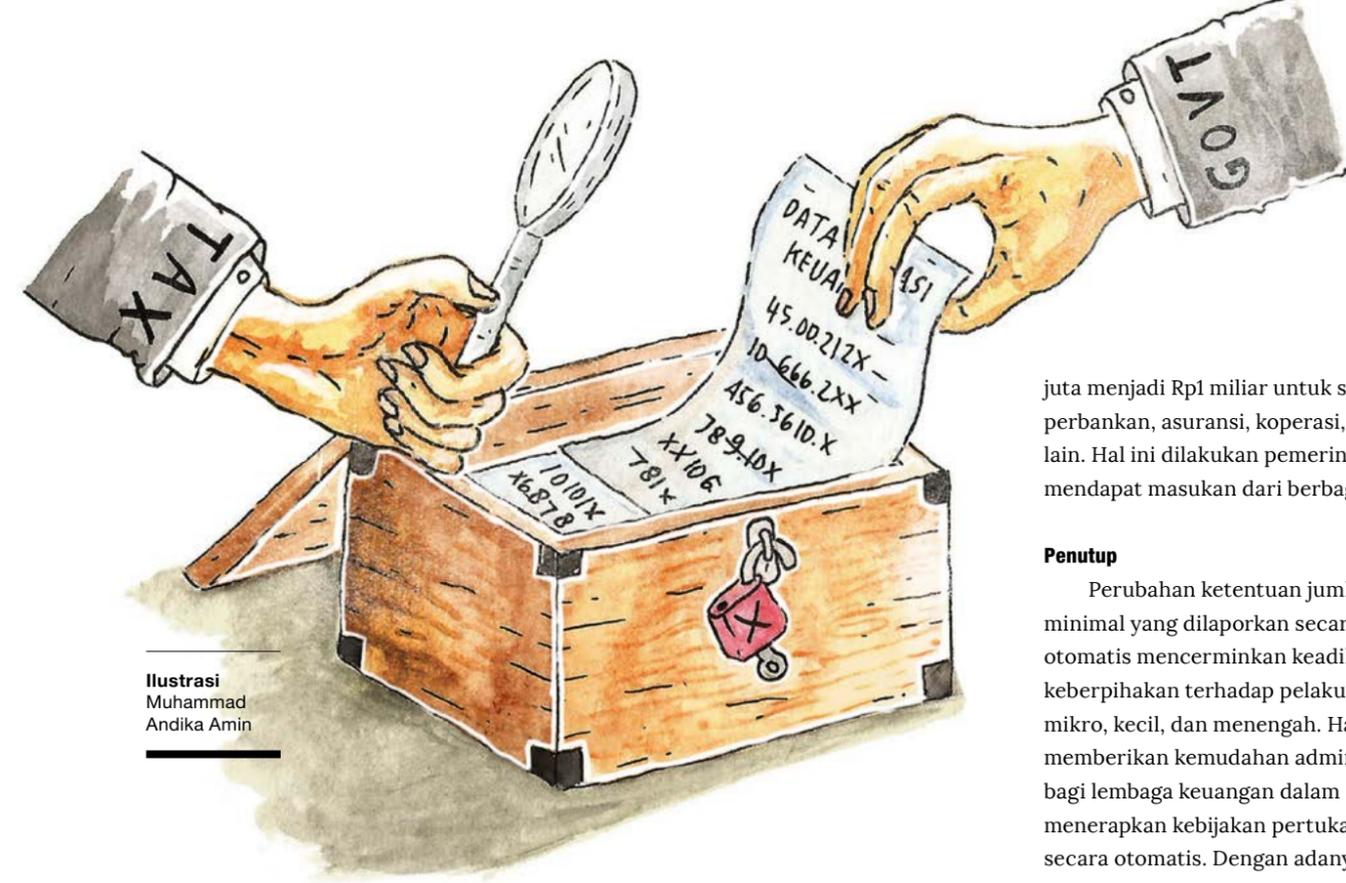
Di samping itu, kewajiban lain adalah kemampuan otoritas pajak untuk mengakses secara otomatis informasi keuangan, tanpa perlu secara spesifik menyebutkan identitas tertentu (nama nasabah atau nomor rekening) untuk

kemudian dipertukarkan dengan negara mitra. Tenggat waktu yang diberikan adalah 2-8 Juli 2017. Negara yang tidak bisa memenuhi akan dilaporkan oleh OECD sebagai daftar negara *non-cooperative jurisdictions* pada G20 Leaders Summit di Jerman.

Sebagai tindak lanjut atas komitmen Indonesia, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017. Selanjutnya, aturan teknis telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 31 Mei 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Laporan: Otomatis dan Atas Permintaan

Penyampaian informasi keuangan kepada DJP dilakukan oleh lembaga keuangan pelapor, yaitu lembaga jasa keuangan (perbankan dan industri keuangan nonbank), lembaga jasa keuangan lainnya, serta entitas lain. Ketiga entitas yang menjalankan usaha sebagai lembaga kustodian, lembaga simpanan, perusahaan asuransi, atau entitas investasi tersebut, wajib menyampaikan informasi secara otomatis maupun atas permintaan DJP.



Ilustrasi
Muhammad
Andika Amin

Selain lembaga keuangan pelapor, diatur pula lembaga keuangan nonpelapor, yaitu lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain (khusus internasional) yang tidak diwajibkan menyampaikan informasi secara otomatis. Sebelum menyerahkan informasi keuangan, lembaga keuangan pelapor maupun lembaga keuangan nonpelapor harus mendaftarkan diri ke DJP dengan menyerahkan beberapa dokumen, termasuk daftar jenis rekening keuangan yang dikecualikan.

Setelah melakukan pendaftaran, entitas wajib melaporkan beberapa data nasabah. Terdapat lima jenis data nasabah yang wajib dilaporkan, yaitu identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga keuangan, saldo rekening keuangan pada akhir tahun kalender, dan penghasilan terkait rekening keuangan.

Identitas pemegang rekening keuangan mencakup nama, alamat, negara domisili, tempat dan tanggal lahir bagi orang pribadi, serta identitas pengendali entitas. Sementara, penghasilan terkait rekening keuangan harus mencakup

bunga, dividen, dan jumlah lain yang dibayarkan atau dikreditkan ke rekening keuangan.

Revisi Batasan: 1 Miliar

Dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2017 diatur bahwa rekening yang harus dilaporkan untuk sektor perbankan, asuransi, koperasi dan entitas lain dibatasi dengan jumlah saldo minimal Rp200 juta untuk rekening orang pribadi. Sementara untuk rekening keuangan entitas, rekening keuangan di luar pasar modal dan perdagangan berjangka komoditas, tidak ada batasan saldo minimalnya.

Data rekening nasabah yang wajib dilaporkan juga berlaku bagi nasabah asing. Saldo minimal nasabah asing atau badan usaha yang sudah dibuka sebelum 1 Juli 2017, wajib dilaporkan dengan agregat saldo sebesar USD250 ribu atau sekitar Rp3,2 miliar. Untuk nasabah atau entitas yang baru dibuka setelah 1 Juli 2017 tidak ada batasannya.

Selanjutnya, PMK Nomor 73/PMK.03/2017 menetapkan perubahan ketentuan batasan saldo rekening yang harus dilaporkan. Dari semula Rp200

juta menjadi Rp1 miliar untuk sektor perbankan, asuransi, koperasi, dan entitas lain. Hal ini dilakukan pemerintah setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

Penutup

Perubahan ketentuan jumlah minimal yang dilaporkan secara otomatis mencerminkan keadilan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini juga memberikan kemudahan administratif bagi lembaga keuangan dalam menerapkan kebijakan pertukaran data secara otomatis. Dengan adanya batas saldo minimum sebesar Rp1 miliar, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan sekitar 496 ribu rekening atau 0,25 persen dari keseluruhan rekening di perbankan saat ini. Hal ini mempermudah aparat pajak untuk melakukan analisis dan dinilai lebih sesuai dengan kapasitas jumlah pegawai pajak.

Adanya ketentuan keterbukaan akses informasi keuangan tidak perlu dikhawatirkan. DJP hanya mendapatkan data saldo agregat, sebab data mutasi atau riwayat transaksi rekening nasabah perbankan tidak turut dilaporkan. Selain itu, kerahasiaan data terjamin karena sistem yang digunakan berstandar internasional. Penerapan sanksi juga dijalankan bagi oknum yang membocorkan data. Nantinya, data tersebut bukan untuk dipajaki, melainkan sebagai tambahan informasi basis pajak. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan kebijakan serupa di seluruh dunia, sehingga tidak ada diskriminasi perlakuan pertukaran informasi antara Indonesia dengan negara lain.

Teks Budi Sulistyono

Ingin Menjadi Presiden

Foto
Anas Nur Huda



“Sebagai otoritas fiskal yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan keuangan dan ekonomi negara, kita harus

memahami politik, pola pikir politisi, dan dampak desain politik terhadap ekonomi. Pemahaman yang baik tentang politik ini akan membekali kita: saat mendayung di antara berbagai kepentingan, menghadapi dilema dalam politik anggaran, dan berpikir komprehensif dalam merumuskan kebijakan”. Demikian penuturan Irwanda Wisnu Wardhana, Peneliti Muda Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sekaligus Wakil Ketua Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Cabang Kementerian Keuangan.

Penguasaannya mengenai Ekonomi Politik bukan saja ditunjang oleh pendidikan formal di jenjang Master dan Doktoral namun juga didukung oleh kecintaannya terhadap tema politik dan ekonomi serta hobinya.

“Hobi pertama dan utama saya adalah

berorganisasi, sejak di sekolah dasar sampai dengan hari ini”, ujar pria yang memiliki sorot mata tegas namun ramah dan lugas sembari tertawa lepas kepada kami.

Tercatat, pria kelahiran 21 Juli 1980 ini, menjadi Presiden Mahasiswa di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN) tahun 2004-2005. Ia juga menjadi juru bicara Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jabodetabek sehingga kerap diundang dalam berbagai forum debat untuk mengawal proses pemilihan presiden RI secara langsung yang pertama kali tahun 2004. Di periode yang sama, untuk mengadvokasi rencana penutupan sekolah kedinasan, Wisnu menggalang puluhan Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan sipil dan militer dalam Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia (FMKI) dan menjadi pendiri serta ketua pertamanya. Saat ini, Wisnu membangun jejaring lintas generasi, lintas agama, dan lintas profesi dengan berbagai aktivitas

antara lain Presiden Klub Bisnis dan Karir (KBK), Pendiri *American-Indonesian (AMINA) Center*, dan Pendiri *Toastmasters Club* di Wahidin-Banteng.

Ketika kami tanyakan cita-citanya, pria kelahiran Magelang ini menjawab cepat, “Sejak kelas 2 SMP, saya telah menempel cita-cita saya di meja belajar: Presiden RI Tahun 2024. Namun, kini cita-cita saya telah berubah. Saya ingin berkontribusi dalam menjadikan Indonesia sebagai negara maju sebelum ulang tahun kemerdekaan ke-100. Jika Korea Selatan berhasil *graduate* dari negara berkembang menajadi negara maju dalam waktu kurang dari 50 tahun, mengapa kita tidak bisa dalam waktu satu abad?”

Tumbuh bersama buku

Melihat sosok yang penuh percaya diri dan *outspoken*, kami tidak menyangka bahwa Wisnu pernah mengalami masa-masa rendah diri karena orang tuanya berpisah di saat ia berumur 3 tahun.

Namun di bawah asuhan sang ibu yang penuh kasih sayang dan biografi tokoh-tokoh besar sebagai pengganti figur ayah, Wisnu dapat membangun kepercayaan dirinya. Titik balik kepercayaan dirinya adalah saat menemukan fakta dari puluhan biografi bahwa banyak tokoh hebat yang terlahir dari *broken family* sehingga tidak ada alasan untuk rendah diri.

“Bung Hatta adalah mentor saya di bidang ekonomi, sementara Bung Karno adalah idola politik saya. Keduanya saya temukan saat menjadikan perpustakaan sebagai rumah kedua sementara rumah pertama saya adalah masjid,” demikian tutur pria yang mengeyam pendidikan dasar dan menengah di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara ini.

Kegemarannya melahap pemikiran tokoh pergerakan nasional dan tokoh terkemuka dunia memberinya wawasan mengenai kepemimpinan, ekonomi, dan politik yang mengkristal pada dua tokoh Proklamator Kemerdekaan tersebut. Selain dari biografi, Wisnu mendapat pencerahan dari kolom opini surat kabar *Republika* khususnya mengenai pola pikir Islam moderat dan progresif di antaranya bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi dan kebangsaan. Kedewasaan berpikir dan hidup di lingkungan yang multikultural, membuat Wisnu memiliki kematangan di atas rata-rata teman sebayanya.

“Saya tertantang untuk membuktikan, dengan berbagai kekurangan yang ada, saya bisa menjadi salah satu orang terbaik di generasi saya,” ujar dosen PKN STAN dan pengajar Diklat Kepemimpinan III ini.

Generasi muda Kemenkeu

Usai lulus D3 STAN, Wisnu pertama kali ditempatkan sebagai Auditor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) pada tahun 2001. Ia sempat

mengalami masa-masa sulit karena lingkungan dan budaya kerja yang sering berbenturan dengan prinsip integritas dan idealisme karena pegawai memperoleh pendapatan resmi yang rendah sementara peluang KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) tinggi. Untuk membangun imunitas diri dan kemandirian, Wisnu bekerja sebagai konsultan pengembangan sumber daya manusia di akhir pekan. Perubahan positif terjadi dengan drastis setelah digulirkannya program Reformasi Birokrasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didukung penuh oleh Dirjen BC Anwar Supriyadi. Jika sebelumnya para pegawai yang bersih “tersingkir”, kemudian pegawai yang melakukan praktek KKN “disingkirkan” dari Kementerian Keuangan.

Di tengah Reformasi Birokrasi dan transformasi organisasi termasuk pemisahan fungsi perencanaan dengan fungsi pelaksanaan, Wisnu pindah ke BKF pada bulan Agustus tahun 2007. Pusat Kerja Sama Internasional (sekarang menjadi dua: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral-PKRB dan Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral-PKPPIM) mengantarkannya pada dunia diplomasi ekonomi. Dalam waktu singkat, ia *tune in* dalam berbagai penugasan forum bilateral dan multilateral. Berbagai negara telah dikunjungi antara lain Swiss, Argentina, Jerman, dan negara-negara di Asia Tenggara.

“Berhati-hatilah ketika berdoa. Ketika doa sudah dikabulkan dan tertulis di langit, *Lauhul Mahfuzh*, maka kita tidak bisa merubahnya lagi,” demikian *lesson learned* yang dia sampaikan saat bercerita tentang studinya.

Jadi, pada saat menjadi mahasiswa D4 Akuntansi, ia menancapkan tekad untuk studi ke Jepang karena terinspirasi gambar Bunga Sakura di rumah

seorang temannya. Harapan tersebut diucapkannya setiap kali mengisi kegiatan seminar, ceramah, dan mengajar sembari meminta para peserta mengaminkannya. Namun, setelah pindah ke BKF, preferensi negara tujuan studinya berubah menjadi *English spoken countries*. Bahkan, ia kemudian mengantongi *Letter of Acceptance* dari *University of Glasgow*, almamater Bapak Ekonomi Adam Smith, dan beberapa kampus di Inggris dan Australia. Namun, pimpinan kantor memerintahkannya berangkat ke Tokyo. Akhirnya, ia menjalankan tugas belajar di *Hitotsubashi University* Jepang dan meraih gelar *Master of Public Policy* pada tahun 2010.

Saat bertugas kembali di BKF, Wisnu mendapat promosi sebagai Kepala Subbidang Energi Efisiensi dan Energi Terbarukan, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF. Saat menikmati pekerjaan di area yang menantang dan baru ini, ia diminta pimpinan untuk mempersiapkan diri melanjutkan kuliah lagi. Kemudian di tahun 2012, Wisnu direkomendasikan oleh Kepala BKF Bambang Brodjonegoro untuk melaksanakan program S3 di Amerika Serikat. Di bulan April 2016, ia menyelesaikan pendidikan doktoral dari *University of Texas at Dallas* dalam waktu tiga tahun dan tercepat di angkatannya. Kini Wisnu memilih jalur pengabdian sebagai pejabat fungsional peneliti dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan perekonomian nasional.

“Ada tiga kekuatan yang penting dimiliki setiap pegawai agar mampu berkontribusi optimal yaitu kompetensi, jejaring, dan integritas,” demikian pesan penutup Wisnu yang kini aktif dalam program *Voyage to Indonesia* 2017.

Teks Pradany Hayyu

Tidak Perlu Berkecil Hati

Seorang wanita muda membuka layar ponselnya. Di sejumlah jejaring sosial yang ia baca, ada begitu banyak pribadi hebat. Ibu dengan banyak anak yang tangguh dalam membesarkan anak-anaknya. Pemuda-pemuda semangat yang selalu mempunyai inovasi baru. Capaian-capaian kawan yang sudah melampaui dirinya. Beragam unggahan foto masakan para ibu muda yang menggugah selera. Jauh bila dibandingkan dengan apa yang bisa ia sediakan untuk suami dan anaknya. Hingga foto perjalanan teman-teman yang sudah mencapai penjuru negeri hingga dunia.

Lalu, di mana dirinya berada?

Dewasa ini, informasi datang silih berganti. Bahkan, jejaring sosial penuh dengan beragam informasi bermanfaat yang menginspirasi. Namun, alih-alih memberikan motivasi, tak jarang selintas pikiran justru membayangi. Berada di mana saya, diantara orang-orang hebat ini?

Dalam hidup, setiap manusia punya tantangan yang berbeda. Tidak ada satupun kisah yang betul-betul mirip satu dengan yang lainnya. Boleh jadi kondisi yang dihadapi sama, tapi ada kepribadian dan kekuatan yang berbeda pada tiap-tiap diri.

Sementara kepribadian dan kekuatan diri kita, terbentuk sejak kita masih berusia belia. Ada andil orangtua, keluarga, lingkungan, hingga pengalaman hidup yang berpengaruh. Dengan demikian, ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Sebab pada hakikatnya, setiap orang punya kadar ujian dan tantangan yang sesuai dengan kemampuannya.

Ini bukan tentang memaklumi keterbatasan diri. Menyadari bahwa ada perbedaan kondisi pada tiap orang, menjadikan kita mampu menerima diri kita apa adanya. Lalu, mulailah berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Dalam hidup, kita hanya perlu menjadi yang terbaik bagi diri kita

sendiri. Lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Tidak perlu mengukur kesuksesan kita pada apa yang berhasil diraih orang lain. Berbahagialah atas apa yang kita miliki saat ini. Berbanggalah atas capaian kita hari ini.

Mengapresiasi diri pada capaian-capaian kecil yang berhasil kita raih, bisa memicu semangat diri agar bisa lebih baik lagi. Pun membuat target dan sangsi, bisa memotivasi diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Bukan demi orang lain, semata agar hidup kita menjadi lebih berkualitas, berbahagia, dan bermanfaat.

Tidak perlu mengukur terlalu jauh pada capaian orang lain. Tantangan itu bukan berada di luar, tapi ada dalam diri kita sendiri. Mulailah pada hal-hal sederhana, sekarang juga. Lalu esok, semoga kita bisa bangga hati dan berkata, "Seperti halnya kalian (orang-orang hebat), saya pun telah melakukan yang terbaik pada diri dan kehidupan saya."

Teks Farida Rosadi

Foto
Anas Nur Huda

Happy Little Soul

Mengikuti aksi ceria Mayesa Hafsa Kirana, atau akrab disapa Kirana, yang diunggah di media sosial Instagram oleh sang ibu Retno Hening Palupi pasti membuat siapapun merasa terhibur. Akun sang ibu (@retnohening) sontak menjadi viral karena foto dan video Kirana yang menggemaskan memikat hati puluhan ribu warganet. Retno yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga pun mendadak menjadi selebgram (selebriti Instagram), terlebih akun @retnohening banyak diunggah kembali oleh komunitas @indovidgram. Perjalanan Retno mengasuh buah hati inilah yang kemudian diceritakan kembali ke dalam sebuah karya Happy Little Soul.

Buku ini bukan tentang panduan mengasuh anak, melainkan mengenai cerita inspiratif seorang ibu dalam mendidik anaknya bahkan sejak masih di dalam kandungan. Layaknya orang tua baru lainnya, Retno juga mengalami suka duka dalam mengasuh anak. Sebagai seorang ibu, Retno tidak malu mengakui kesalahannya dalam mendidik anak. Agar tak mengulangi kesalahan yang sama, Retno terus mencoba memperbaiki diri dan banyak belajar ilmu pengasuhan anak demi membesarkan Kirana dengan baik. Retno juga menuliskan tips pengalaman mengasuh anak dan bermain berdasarkan pengalaman pribadi.

Kirana bukan hanya sosok balita menggemaskan yang menghibur. Lebih dari itu, ia adalah pengingat untuk semua ibu yang memiliki tugas seumur

hidup untuk selalu menjaga, menemani, memahami, menyayangi, membesarkan dengan penuh cinta si buah hati. Di sisi lain, penulis juga mengingatkan pembagian peran pengasuhan dengan suami. Saat ibu membutuhkan bantuan, sebaiknya secara langsung mengutarakan kepada suami. Begitu juga saat ada sesuatu yang tidak pas di hati, sebaiknya langsung disampaikan. Bukan memberi kode-kode yang justru susah dipahami suami. Dengan begitu, suami mengerti apa yang diinginkan dan apa yang harus dibantu.

Siapapun yang membaca buku ini akan mendapatkan luapan semangat dan energi positif untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Bagi Retno, menjadi Ibu adalah menjadi bahagia dengan segala problematika yang ada. Seorang ibu wajar melakukan kesalahan, namun harus belajar dari kesalahan itu dan segera bangkit. Berani mengambil peran sebagai Ibu berarti harus berani juga menghadapi kepenatan yang mustahil tidak ada. Menjadi ibu bukanlah hal yang mudah. Seorang ibu akan belajar bersabar tiada henti dan mencintai suami serta anak setiap hari.

Membaca buku ini seperti sedang menatap Kirana dari dekat. Di akhir buku, pembaca bisa menikmati kiriman gambar dari para penggemar Kirana yang biasa disapa #TemanMainKirana. Buku ini dipersembahkan untuk semua ibu dan calon ibu. Selamat membaca!

Peresensi Khrisna Pandu Pradana



Judul:
Happy Little Soul : Belajar Memahami Anak Dengan Penuh Cinta
Pengarang:
Retno Hening Palupi
Penerbit:
Gagas Media
Kota Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2017
Deskripsi Fisik:
202 halaman
ISBN:
9789797808860

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

Perpustakaan Kemenkeu
Perpustakaan Kementerian Keuangan
@kemenkeulib

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 Tentang Kamu Tere Liye
- 2 Haji Backpacker Aguk Irawan
- 3 The Girl On The Train Paula Hawkins
- 4 Tuhan, Maaf, Kami Sedang Sibuk: Renungan dan Inspirasi Spiritual Orang Kantoran Ahmad Rifa'i
- 5 9 Autumn 10 Summers Iwan Setyawan

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 Bawa Perubahan (BAPER) Rhenald Kasali
- 2 TOEFL iBT ETS
- 3 Cost Accounting A Managerial Emphasis Fourteenth Edition Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan
- 4 Akuntansi Forensik & Audit Investigatif Theodorus M. Tuanakotta
- 5 Happy Little Soul Retno Hening Palupi



Pantai Rahasia di Tolitoli

Kabupaten Tolitoli di Sulawesi Tengah dikenal terpencil. Penerbangan menuju kota ini terbatas hanya sekali sehari, dari dan melalui kota Palu menggunakan pesawat baling-baling. Saat saya pertama kali akan mendarat di Bandara Lalos, diam-diam saya mengintip melalui jendela pesawat. Nun di bawah sana terhampar pulau-pulau eksotis yang seakan memanggil untuk dijelajahi.

Tolitoli dikelilingi oleh bukit-bukit cengkeh. Selain cokelat dan kelapa, cengkeh memang menjadi komoditi nomor satu kota ini. Sudut-sudut kota dipenuhi aroma khas bunga cengkeh kering yang di jemur di depan rumah-rumah penduduk.

Perairan Tolitoli sangat tenang karena dihalangi oleh tiga pulau utama yaitu Lutungan, Tumpangan, dan

Kabetan yang memanjang menghadap kelaut lepas. Tidak butuh waktu lama untuk mengelilingi kota ini. Namun, jika ingin mengelilingi satu kabupaten dari perbatasan Buol hingga Donggala, dibutuhkan waktu paling kurang tujuh jam melalui jalan Trans Sulawesi yang merupakan satu-satunya akses darat. Banyak pantai di Tolitoli yang masih begitu sepi dan bersih. Pantai-pantai itu terbentang dari selat Makassar hingga Laut Sulawesi.

Perjalanan kali ini membawa saya ke utara. Pagi-pagi sekali saya berangkat membelah jalanan yang masih berembun dengan mengendarai sepeda motor. Perjalanan berkelok-kelok dengan banyak tanjakan memakan waktu sekitar dua setengah jam. Semuanya terbayar dengan pemandangan pantai biru dan hamparan pasir putih di desa Pinjan, Kecamatan

Tolitoli Utara. Tak ada seorangpun disana dan tentunya tak ada tiket masuk. Pasirnya rapi bersih di sapu ombak semalam.

Pantai itu berada di dusun Bei, sebab itu pula dinamai Pantai Bei. Pohon-pohon kelapa tampak rapat tinggi menjulang berkiblat ke birunya laut. Mentari pagi cerah bersinar dari celah tebing yang curam. Di balik tebing tersebut terdapat hutan primer yang menjadi kawasan Suaka Margasatwa Tanjung Matop. Kawasan ini menjadi rumah bagi hewan endemik Sulawesi seperti anoa, monyet hitam, dan rangkong.

Tak jauh dari situ, Pulau Pinjan yang menjadi bagian Tanjung Matop terlihat menawan dengan pasir putihnya yang timbul ketika air laut surut. Di pulau ini terdapat penangkaran burung Maleo Senkawor, satwa endemik Sulawesi yang terancam punah dalam daftar merah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Sayangnya, ketika saya berada di sana tak ada nelayan dan perahu yang bersandar untuk ditumpangi menyeberang.

Jarak yang jauh dan akses yang terbatas membuat pantai-pantai indah di Desa Pinjan jarang dikunjungi oleh wisatawan. Kebanyakan mobil yang lewat di sepanjang Trans Sulawesi mengangkut penumpang lintas kabupaten menuju Kabupaten

Buol atau sebaliknya. Rumah-rumah warga juga saling berjauhan. Begitu pula dengan jarak antara satu pemukiman dengan pemukiman lain.

Puas menikmati indahnya pantai, bermain air, memasak dan makan siang, saatnya kembali pulang untuk beristirahat dan mempersiapkan diri bekerja keesokan harinya. Perjalanan pulang dari Pinjan tidak membuat saya lelah. Tak lupa saya singgah sebentar di salah satu warung pinggir jalan untuk menikmati Ambal ditemani segelas teh hangat. Ambal adalah makanan khas Tolitoli. Bentuknya bulat pipih seperti pizza, terbuat dari sagu, kelapa, dan ikan serta dimakan dengan sambal rica-rica. Pemandangan yang terbentang dari desa ke desa dan sejuknya hutan akan menemani saya disepanjang perjalanan pulang.

Keindahan Pantai di Tolitoli

Teks dan foto Ikhsan Haris, Pegawai KPP Pratama Tolitoli

Jalan Sembari Jajan, Kenapa Tidak?

Jalan-jalan dan kuliner merupakan dua mata koin yang tak bisa dipisahkan. Sembari berpergian, tentu setiap orang ingin mencicipi menu bersantap yang khas di setiap tempat yang dikunjunginya. Bermula dari kegemaran untuk mencicipi kuliner dan jalan-jalan tersebut, Julia dan suami, Marius, membangun *blog* kuliner anakjajan.com. Di sini, mereka menyajikan beragam pilihan makanan dan destinasi menarik di dalam dan luar negeri.

Saat diwawancarai tertulis oleh Media Keuangan bulan Juni lalu, Julia menceritakan kisah awal *blog* kulinernya. Ia cukup banyak melakukan perjalanan untuk mencoba makanan. Saking

banyaknya, mereka terkadang lupa sudah pernah mengunjungi tempat mana saja, mencoba menu apa, dan bagaimana kesan dari tempat dan makanan tersebut. Karena hal tersebut, pada 2011 Julia memutuskan membuat suatu media yang dapat mendokumentasikan hobinya tersebut. Akhirnya, ia memilih media *blog* yang juga menjadi buku *diary*. Selain itu, ia berharap *blog* kulinernya bisa menjadi referensi bagi para pecinta jajanan yang membutuhkan komentar dan inspirasi.

Blog Anak Jajan diawali dengan review dari restoran dan makanan yang disajikannya. Dari tulisan kecil-kecilan, kini *blog* ini juga membahas mengenai resep-resep yang *easy cook*, *travelling*, dan juga *lifestyle*. Di sini, selain berbagi komentar terkait kuliner, Julia juga berbagi banyak informasi menarik terkait wisata baik di dalam maupun luar negeri. Contohnya, saat melakukan *food travelling*, ia suka menantang dirinya untuk mencoba aneka makanan khas lokal. Terkadang makanan tersebut tidak umum dari kacamata orang Indonesia, tetapi mereka justru tertantang untuk mencobanya. Misalnya, Stinky Tofu di Taiwan, Balut di Philippines, dan Ikan Fugu di Jepang.

Sementara itu, menurutnya proses pembuatan *blog* kuliner yang menarik memang membutuhkan kerja keras. Ia menjelaskan bahwa untuk bisa menjadi orang yang hebat dan fasih dalam melakukan suatu hal harus melalui proses pembelajaran. Belajar dan pengembangan diri adalah kunci utama kesuksesannya dalam menulis *blog*. "Baik dari sisi tulisan maupun foto, kita berdua selalu berusaha untuk belajar dan mengembangkan diri kita. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2011 hingga sekarang tahun 2017, konten isi di *blog* kita sudah banyak berubah karena kita selalu tertantang untuk menjadi lebih baik", jelas Julia.

Julia lalu menceritakan pengalamannya setelah mencicipi kuliner di mancanegara. Dari semua negara yang sudah pernah dikunjunginya, ia merasa masakan Indonesia merupakan makanan yang tidak ada duanya alias nomor satu. Dengan variasi menu yang begitu banyak dan bumbu yang begitu kaya, ia sangat optimis dan yakin bahwa kuliner Indonesia mampu bersaing dengan kuliner negara lain. "Kita sangat setuju dan yakin bahwa wisata kuliner bisa menjadi satu potensi yang besar, melihat besarnya minat masyarakat terhadap perkembangan kuliner", harapnya.

Teks Abdul Aziz

Foto
Dok. pribadi



Mas Praim

Cerita : Arfindo

Gambar : Bimo Adi



MEMPERINGATI HARI ANAK NASIONAL
23 JULI 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA